

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH

DESEMBER 2019



Badan Pengelola
Keuangan Haji

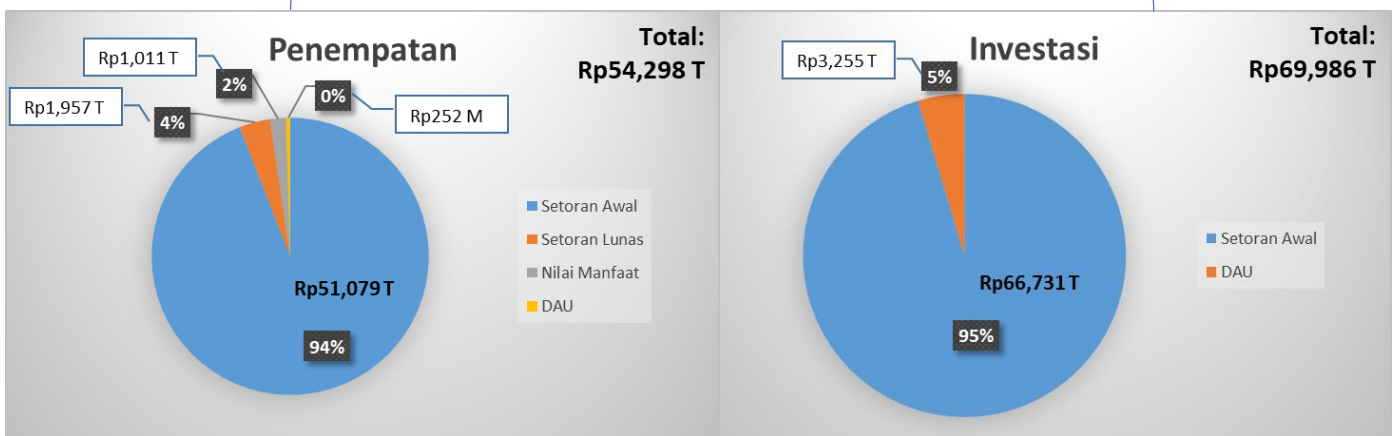


Disampaikan kepada
Dewan Pengawas

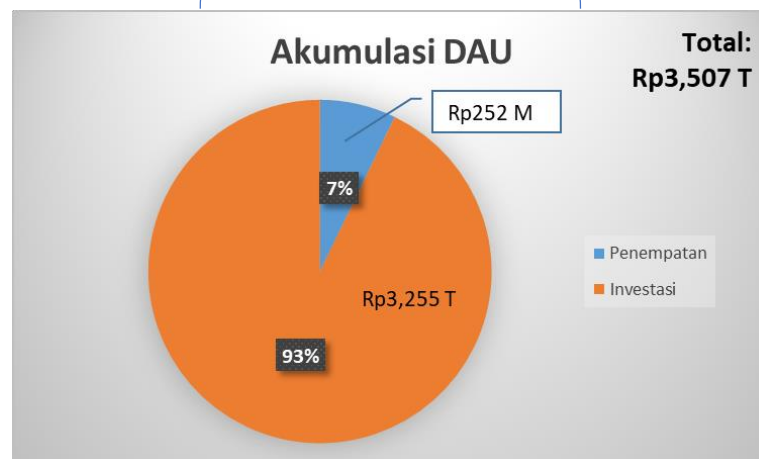
IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH BULAN DESEMBER 2019

1. PENERIMAAN KEUANGAN HAJI (Rp127,791 T)

Akumulasi Setoran Jemaah Haji (Rp124,284 T)

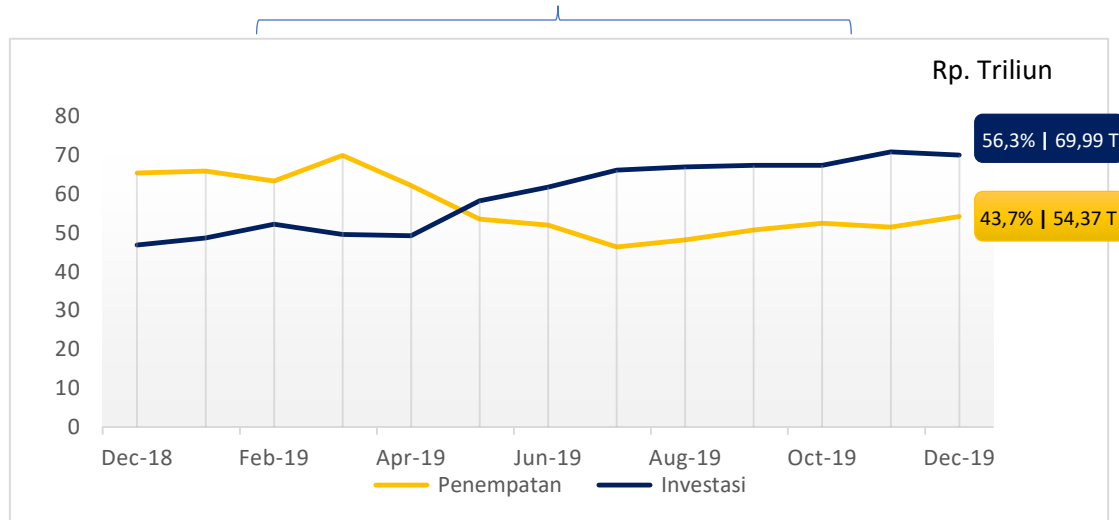


Akumulasi Dana Abadi Umat (DAU) (Rp3,507 T)

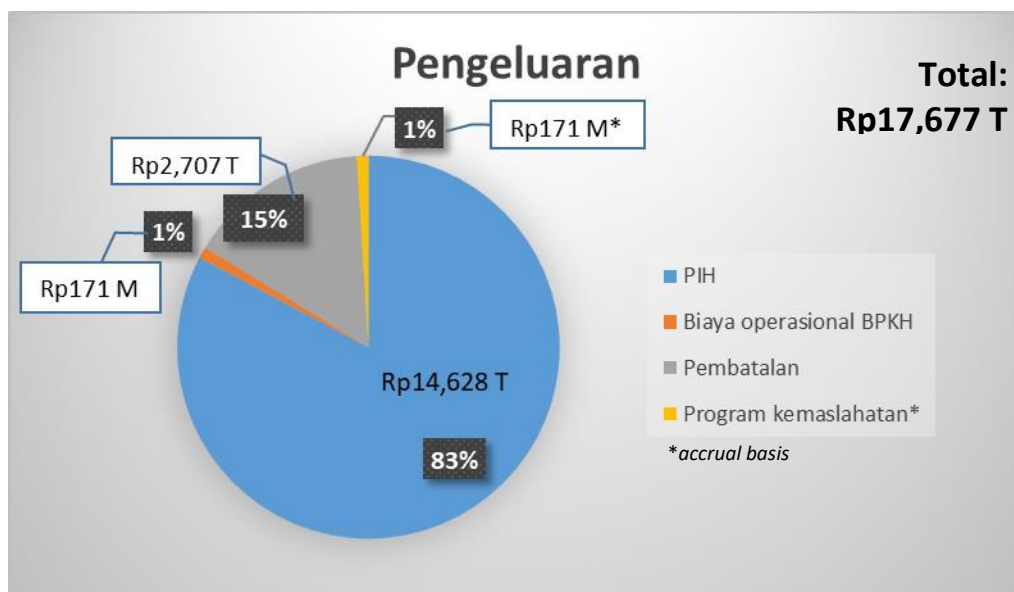


IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH BULAN DESEMBER 2019

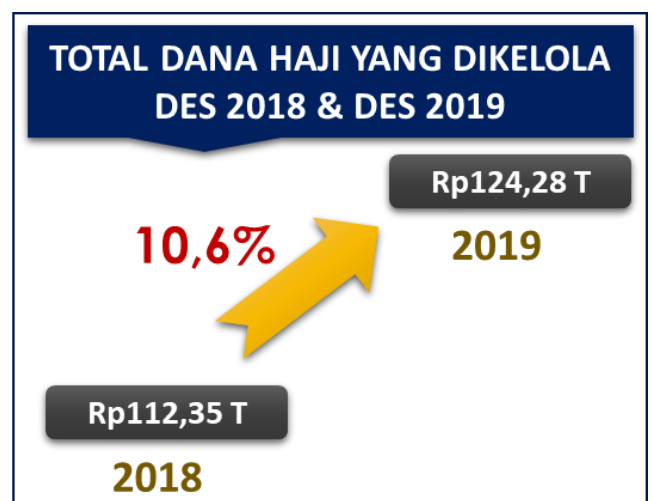
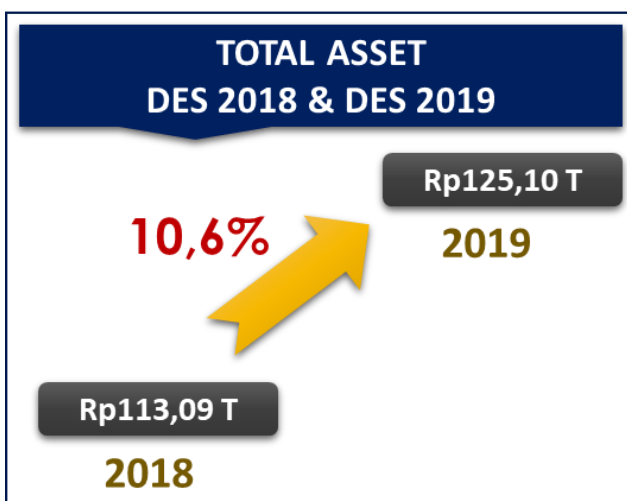
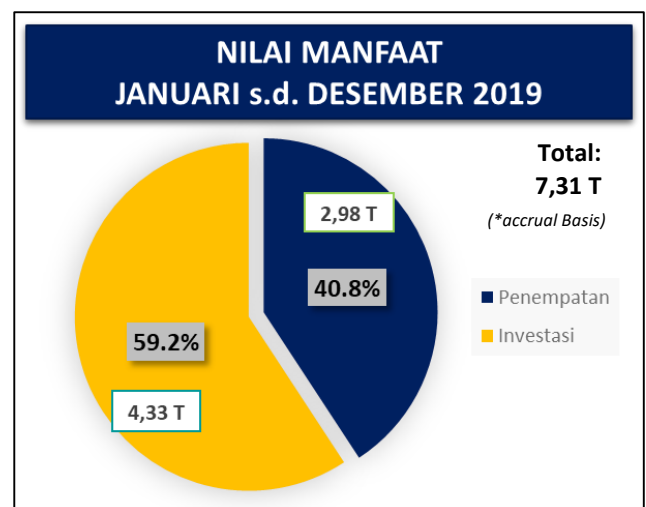
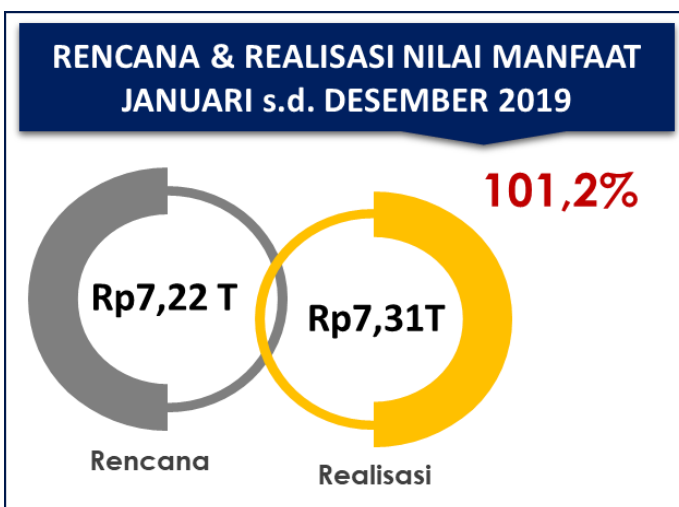
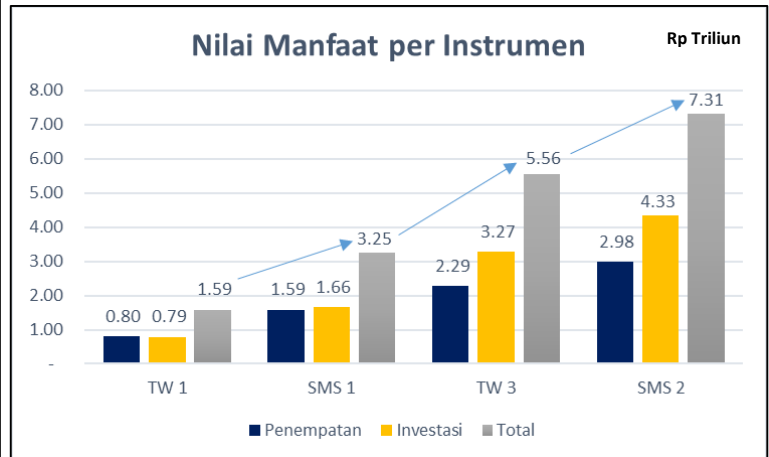
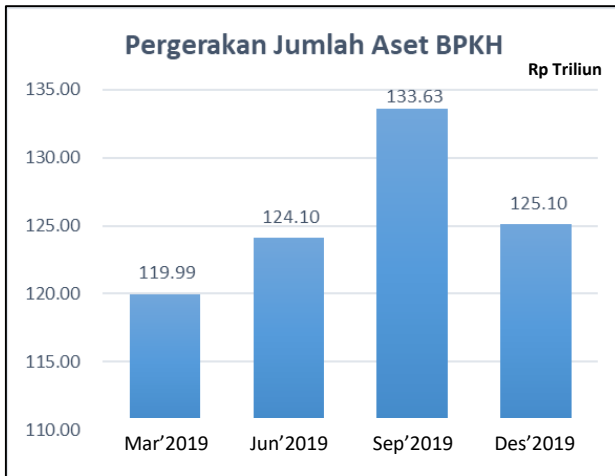
2. PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI (Rp124,284 T)



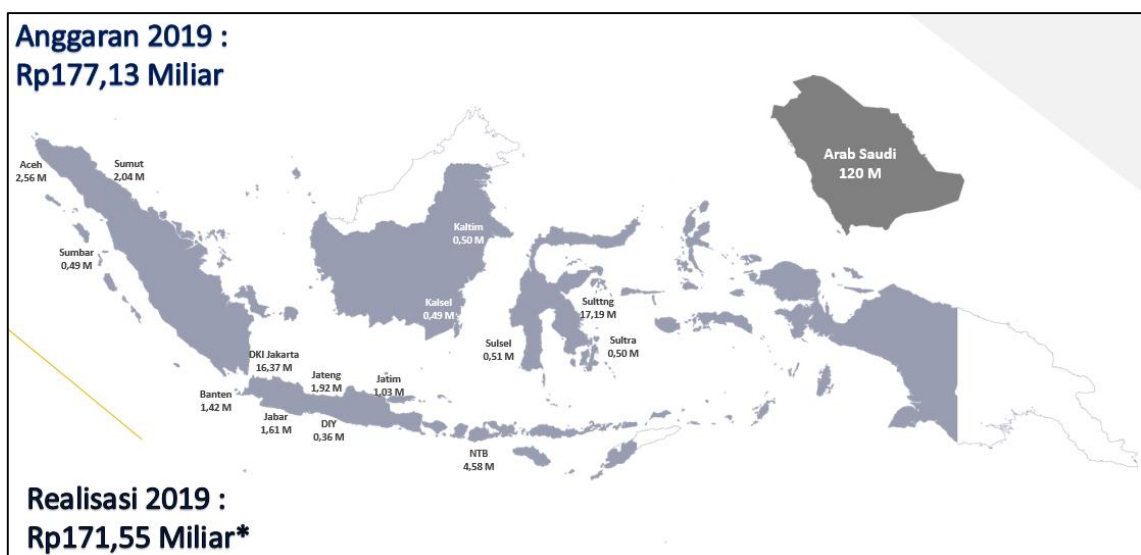
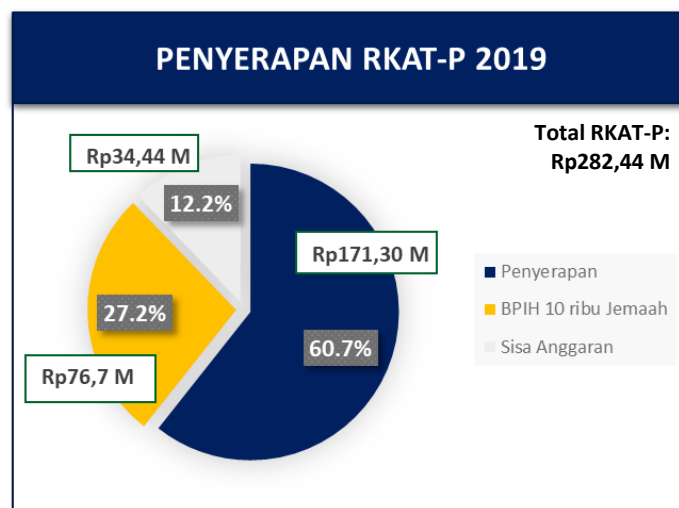
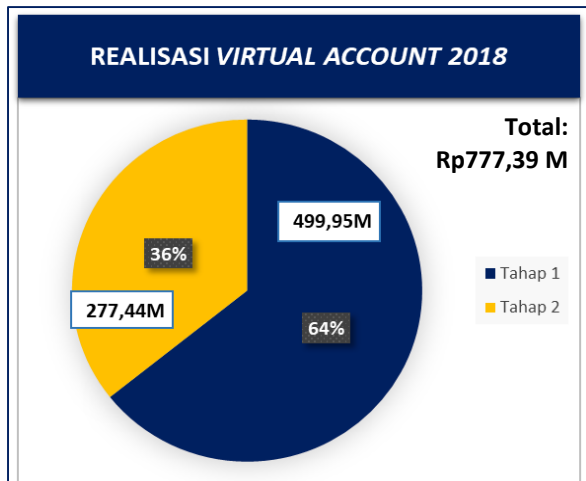
3. PENGELUARAN KEUANGAN HAJI (Rp17,677 T)



IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH BULAN DESEMBER 2019



IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH BULAN DESEMBER 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan Desember Tahun 2019 telah dapat diselesaikan oleh Badan Pelaksana BPKH. Laporan ini merupakan amanah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp124,28 triliun, naik sebesar Rp1,87 triliun (1,5%) apabila dibandingkan dengan bulan November 2019 yang tercatat sebesar Rp122,41 triliun. Pada bulan Desember 2019, komposisi dana haji tersebut terbagi menjadi dua besaran yaitu pada penempatan di perbankan syariah sebesar Rp54,30 triliun atau 43,7% dan pada investasi di instrumen investasi syariah sebesar Rp69,99 triliun atau 56,3% dimana di dalamnya termasuk Dana Abadi Umat (DAU). Produk perbankan syariah yang digunakan oleh BPKH untuk penempatan dana adalah; giro, tabungan, dan deposito. Sedangkan instrumen investasi dimaksud antara lain: Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Korporasi, Reksadana Pasar Uang Syariah, Reksadana Terproteksi Syariah, dan Saham. Nilai manfaat yang diperoleh BPKH dari penempatan dan investasi, s.d. bulan Desember 2019 adalah sebesar Rp7,31 triliun dengan pencapaian 101,2% dari target sebesar Rp7,22 triliun.

Distribusi nilai manfaat yang diperoleh dari Dana Abadi Umat (DAU) dikategorikan oleh BPKH kepada enam kelompok aktivitas (pendidikan dan dakwah, pelayanan haji, sarana/prasarana ibadah, kesehatan, sosial keagamaan, serta bantuan bencana) dengan total penyaluran s.d. bulan Desember 2019 sebesar Rp171,55 miliar atau sebesar 96,8% (*accrual basis*) apabila dibandingkan dengan target sebesar Rp177,13 miliar. Namun, secara perhitungan *cash basis*, penyerapan kegiatan kemaslahatan adalah sebesar 88,4% atau sebesar Rp156,55 miliar (*cash basis*), hal ini disebabkan oleh tertundanya proses penyaluran kegiatan kemaslahatan sebesar Rp15 miliar dalam bentuk dana bergulir temporer Cash Waqaf Link Sukuk

(CWLS). CWLS akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, karena harus menunggu jumlah *exposure* sebesar Rp50 miliar.

Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh BPKH juga disalurkan pada *virtual account* jemaah haji tunggu, dimana dari nilai manfaat tahun 2018 telah didistribusikan Rp777,39 miliar yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 7 Februari 2019 sebesar Rp499,95 miliar, dan tahap 2 sebesar Rp277,44 telah didistribusikan pada tanggal 7 Agustus 2019. Untuk tahun 2019, distribusi target nilai manfaat kepada *virtual account* jemaah haji tunggu dialokasikan sebesar Rp1,083 triliun dan akan dilaksanakan setelah total perolehan nilai manfaat tahun 2019 selesai dicatat dan dibukukan di dalam laporan keuangan BPKH.

Pada bulan Maret 2019, mempertimbangkan berbagai perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal serta dalam rangka mendukung peningkatan kinerjanya, maka BPKH mengajukan perubahan RKAT kepada DPR RI. Usulan perubahan anggaran tersebut disetujui dan kemudian ditetapkan pagu biaya operasional baru oleh DPR RI sebesar Rp286,46 miliar, dimana pagu anggaran sebelumnya adalah sebesar Rp274,99 miliar. Namun demikian, berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan haji yang efisien, maka pagu RKATP 2019 BPKH yang disepakati bersama antara Badan Pelaksana dengan Dewan Pengawas adalah sebesar Rp282,44 miliar. Pada bulan Mei 2019, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji kepada Pemerintah Indonesia sebanyak 10 ribu jemaah untuk keberangkatan pada musim haji tahun 2019. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembiayaan atas tambahan kuota 10 ribu jemaah haji tersebut, salah satu langkah yang diambil oleh BPKH adalah dengan melakukan rasionalisasi atau efisiensi terhadap anggaran RKAT-P 2019 sebesar kurang lebih Rp76,7 miliar. Sedemikian sehingga pagu anggaran RKAT-P 2019 yang dapat digunakan adalah maksimum sebesar Rp205,69 miliar.

Dalam pengelolaan keuangan haji, Badan Pelaksana melakukan peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan kinerja dan keuangan. Dari sisi kinerja, Badan Pelaksana memastikan seluruh proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari sisi pelaksanaan penggunaan anggaran, Badan Pelaksana menggunakannya dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Kedua aspek tersebut juga menjadi indikator kinerja utama dalam sistem penilaian kinerja BPKH. Secara umum, selain dari dana haji dan nilai manfaat, kinerja BPKH juga direpresentasikan oleh: memperoleh opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2018; ISO 9001:2015 untuk proses penempatan dana, investasi surat berharga, kegiatan kemaslahatan, pengembalian dana pembatalan, dan audit internal; menggunakan prinsip *four*

eyes dalam proses pengambilan keputusan pada penempatan dana, investasi, dan kemaslahatan; menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC) dalam penilaian kinerja baik level unit maupun individu; pengembangan *virtual account* bagi jemaah haji tunggu; pembangunan Data Center; serta pengembangan Siskehat. Apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak di lingkungan Badan Pelaksana atas dukungannya terhadap kelancaran proses penyelesaian laporan pertanggungjawaban, seluruh kontribusi berupa dukungan, *review*, dan masukan dari semua pihak, berpengaruh terhadap keseluruhan proses penyelesaian laporan pertanggungjawaban ini sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, Januari 2020

Badan Pelaksana BPKH



Anggito Abimanyu

Kepala Badan Pelaksana



Ajar Susanto Broto

Anggota Bidang Perencanaan
dan Manajemen Risiko

DAFTAR ISI

Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji	
Badan Pengelola Keuangan Haji bulan Desember 2019	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I. Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan	1
BAB II. RKAT Perubahan Tahun 2019	2
RKAT-P 2019	2
RKAT-P 2019 Efisiensi	3
Ikhtisar RKAT Perubahan tahun 2019	4
BAB III. Analisis Kinerja BPKH	5
Dana Haji	5
Nilai Manfaat	11
Prognosa Pencapaian Target BPKH 2019	12
Pencapaian Target Bisnis BPKH 2019	13
Resume Pengelolaan Keuangan Haji	16
Program Kemaslahatan	22
<i>Virtual Account</i>	22
Kinerja Bidang	23
Highlight Pencapaian Masing-Masing Bidang	25
Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi Media	33
Tindak Lanjut Hasil Audit	36
Pengelolaan SDM BPKH	40
BAB IV. Laporan Keuangan BPKH bulan Desember Tahun 2019	43
Laporan Keuangan Bulan Desember 2019	44
Neraca	45
Laporan Operasional	46
Laporan Perubahan Aset Neto	47
Laporan Realisasi Anggaran	48
BAB V. Penutup	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ikhtisar RKAT Perubahan Tahun 2019	4
Tabel 3.1. Posisi Sebaran Dana Haji (Penempatan) pada BPS BPIH bulan Desember 2019	6
Tabel 3.2. Alokasi Investasi BPKH.....	7
Tabel 3.3. Ringkasan Profil Risiko Portfolio Investasi BPKH	7
Tabel 3.4. Rincian Instrumen SDHI yang dimiliki BPKH	8
Tabel 3.5. Rincian Instrumen SBSN yang dimiliki BPKH.....	8
Tabel 3.6. Rincian Instrumen SBSN USD yang dimiliki BPKH.....	9
Tabel 3.7. Sukuk Korporasi yang dimiliki BPKH	9
Tabel 3.8. Rincian Instrumen Reksadana Terproteksi Syariah	9
Tabel 3.9. Rincian Instrumen Reksadana Pasar Uang Syariah.....	10
Tabel 3.10. Penambahan Dana Haji Baru s.d bulan Desember 2019.....	11
Tabel 3.11 Penambahan Jumlah Calon Jemaah Haji Baru s.d bulan Desember 2019	11
Tabel 3.12 Pencapaian Target Bisnis BPKH s.d bulan Desember 2019	13
Tabel 3.13 Rincian Nilai Manfaat Investasi s.d bulan Desember 2019	15
Tabel 3.14 Kontribusi BPS-BPIH Terhadap Nilai Manfaat Penempatan s.d bulan Desember 2019.....	15
Tabel 3.15 Resume Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Desember 2019 (Rp.Miliar)	17
Tabel 3.16 Distribusi Program Kemaslahatan Tahun 2018-2019.....	19
Tabel 3.17 Program Kemaslahatan Terkait dengan Rehabilitasi Bencana PASIGALA (Palu, Sigi dan Donggala)	21
Tabel 3.18 Distribusi Nilai Manfaat (NM) melalui Virtual Account (VA) Tahun 2018.....	22
Tabel 3.19 Pencapaian Output per Bidang s.d. bulan Desember 2019.....	24
Tabel 3.20 Penyerapan Anggaran per Bidang s.d bulan Desember 2019.....	24
Tabel 3.21 Kegiatan terkait Media dan Interaksi dengan Stakeholders s.d. bulan Desember 2019.....	33
Tabel 3.22 Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan di Bidang SDM.....	42
Tabel 4.1 Rasio Keuangan BPKH	43
Neraca Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	45
Laporan Operasional untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019	46
Laporan Perubahan Aset Neto untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019.....	47
Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Komposisi Investasi dan Penempatan Dana Haji	5
Gambar 2 Nilai Manfaat per Instrumen	12
Gambar 3 <i>Yield</i> Portfolio Investasi BPKH vs <i>benchmark yield</i>	14
Gambar 4 Realisasi Kegiatan Kemaslahatan.....	18
Gambar 5 Sebaran Dana Kemaslahatan.....	19
Gambar 6 Realisasi <i>Virtual Account</i> 2018.....	23
Gambar 7 Penyerapan Anggaran RKAT-P 2019.....	25
Gambar 8 Sebaran Data Pegawai BPKH s.d. bulan Desember 2019	41
Gambar 9 Komposisi Usia Pegawai BPKH	41
Gambar 10 Latar Belakang Pendidikan Pegawai BPKH	42
Gambar 11 Pertumbuhan Aset Keuangan BPKH periode Juli s.d. Desember 2019	43

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan Desember 2019 merupakan amanah dari Pasal 52 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Kode Etik, dan Pakta Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji.

Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, Badan Pelaksana BPKH diwajibkan menyampaikan Laporan yang berisi Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

TUJUAN

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji BPKH bulan Desember 2019, meliputi antara lain:

- a. memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- b. melakukan analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana;
- c. sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pelaksana dalam pengelolaan keuangan haji.

BAB II

RKAT PERUBAHAN TAHUN 2019

Menurut Peraturan BPKH Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKAT, dalam hal dipenuhi kondisi tertentu RKAT dapat dilakukan perubahan program, kegiatan, alokasi, dan besaran anggaran paling lama pada bulan Juni tahun berjalan. Persetujuan DPR dibutuhkan dalam hal rancangan perubahan RKAT, serta penyampaian usulan perubahan tersebut diajukan kepada DPR paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan BPKH Nomor 6 tersebut, Badan Pelaksana dapat melakukan perubahan RKAT pada tahun anggaran berjalan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan kegiatan dalam suatu Bidang;
- b. perpindahan kegiatan dan/atau program ke Bidang lain;
- c. perubahan kebijakan penganggaran;
- d. kegiatan atau program baru dalam suatu Bidang; dan/atau
- e. penambahan kegiatan operasional.

Dalam hal terdapat penambahan jenis kegiatan atau program baru dalam suatu Bidang, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari Badan Pelaksana. Apabila perubahan, perpindahan dan/atau penambahan kegiatan/program tersebut menimbulkan penambahan anggaran operasional BPKH, maka perubahan RKAT tersebut memerlukan persetujuan DPR.

RKAT-P 2019

Merujuk pada hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2019, dipandang perlu untuk melakukan perubahan nomenklatur, prioritas dan besaran anggaran pada program/kegiatan tertentu, melakukan perpindahan program/kegiatan antar bidang, serta menambah program pengembangan pegawai, kerjasama kelembagaan dan kegiatan investasi keuangan haji. Perubahan kebijakan penganggaran juga harus dilakukan sehubungan dengan penetapan BPIH 2019 yang menyesuaikan asumsi nilai tukar, meningkatkan biaya operasional (*indirect cost*) BPIH, mengalihkan alokasi rekening *virtual* sebesar Rp500 miliar untuk *indirect cost* dan membebaskan biaya bantuan jemaah haji lansia di Arab Saudi.

Selain itu, Badan Pelaksana juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan tata kerja organisasi BPKH dan memutuskan untuk melakukan perubahan struktur organisasinya. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, fokus kinerja dan akuntabilitas kinerja BPKH. Beberapa pokok perubahan tersebut meliputi: mengembalikan fungsi audit

internal sebagai organ Kepala Badan Pelaksana, memperkuat organisasi internal Bidang Investasi, menciptakan divisi Pengembangan yang akan menjadi sekretariat pengembangan keuangan haji, serta mengembangkan divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2019 dan perubahan struktur organisasi Badan Pelaksana tersebut menjadi dasar dan landasan dalam usulan perubahan RKAT 2019 dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji.

Pada RKAT-P 2019 tersebut, usulan anggaran untuk jenis belanja operasional yang disetujui dan ditetapkan oleh DPR RI adalah sebesar Rp286,46 miliar atau naik sebesar 4,17% dari anggaran RKAT 2019 sebesar Rp274,99 miliar. Agar pelaksanaan akuntabilitas RKAT-P 2019 berjalan tertib dan lancar, masing-masing Anggota Badan Pelaksana sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) RKAT-P 2019 menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, merumuskan standar operasional setiap program/kegiatan, menyusun sistem pengawasan dan pengendalian, melakukan sinkronisasi dan sinergi terhadap kegiatan antar bidang, serta melakukan penghematan tanpa mengabaikan standar biaya dan mengurangi target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan haji yang efisien, maka pagu RKAT-P 2019 BPKH yang disepakati bersama antara Badan Pelaksana dengan Dewan Pengawas adalah sebesar Rp282,44 miliar.

RKAT-P 2019 Efisiensi

Saat Presiden RI mengadakan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada bulan April 2019, Kerajaan Arab Saudi memutuskan untuk memberi tambahan kuota haji kepada Indonesia sebanyak 10.000 jemaah yang diberlakukan pada musim haji tahun 2019. Keputusan tersebut di satu sisi merupakan kabar gembira bagi jemaah haji tunggu, namun di sisi lain perlu dipikirkan mengenai sumber pendanaan untuk menutup *indirect cost* BPIH atas tambahan kuota tersebut. Dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat antara DPR dengan Kementerian Agama, yang juga dihadiri oleh Badan Pelaksana BPKH, ditetapkan bahwa jumlah *indirect cost* BPIH untuk kuota tambahan tersebut adalah sebesar Rp319,9 miliar, dimana yang menjadi tanggungan BPKH adalah sebesar Rp220 miliar.

Sumber pendanaan atas tambahan BPIH tersebut secara keseluruhan berasal dari: Rp65 miliar hasil efisiensi pengadaan SAR tahun 2019, Rp50 miliar dari realokasi *virtual account*, dan Rp76,7 miliar dari rasionalisasi penyerapan RKAT-P 2019 tahap kedua yang meliputi cadangan investasi, cadangan hukum, serta cadangan SDM dan efisiensi berupa anggaran perjalanan dinas dan belanja kegiatan. Cadangan investasi tidak dipergunakan karena belum ada realisasi investasi yang memiliki risiko menengah ke atas. Cadangan hukum dapat ditunda karena diperkirakan pada tahun 2019 belum ada realisasi investasi di Arab Saudi yang signifikan dan kasus-kasus hukum yang memerlukan pembelaan hukum. Sedangkan cadangan SDM untuk penghasilan dan gaji anggota, pegawai, serta biaya pelatihan diperkirakan sebagian dapat dihemat pada tahun 2019.

Dalam rangka rasionalisasi penyerapan anggaran RKAT-P 2019, setiap bidang melakukan perhitungan rasionalisasi terhadap anggaran dengan fokus pada: program/kegiatan yang outputnya dapat dicapai namun diperkirakan masih terdapat sisa anggaran; program/kegiatan yang tidak terlalu mendesak untuk dilakukan, dan/atau program/kegiatan yang setelah ditinjau ulang, dapat dijadwal ulang ke tahun berikutnya. Berdasarkan hasil rasionalisasi, masing-masing bidang telah dapat melakukan identifikasi rasionalisasi anggaran melalui pemblokiran anggaran dengan total Rp76,75 miliar. Oleh karena itu, pagu anggaran biaya operasional RKAT-P 2019 efisiensi adalah sebesar 205,69 miliar.

Ikhtisar RKAT Perubahan tahun 2019

Berikut pada tabel di bawah adalah perbandingan rincian biaya operasional dalam bidang antara RKAT 2019, RKAT-P 2019, dan RKAT-P 2019 Efisiensi.

Tabel 2.1 Ikhtisar RKAT Perubahan tahun 2019

No.	Bidang/Divisi	RKAT 2019	RKAT-P 2019	RKAT-P 2019 Efisiensi
1.	Pengembangan dan Kemaslahatan	8.993.552.000	7.320.315.000	5.549.517.000
2.	Keuangan	3.470.000.000	3.470.000.000	3.226.457.000
3.	Investasi	28.056.800.000	29.867.270.000	13.127.270.000
4.	Operasional dan IT	20.803.679.000	20.803.679.000	19.419.742.500
5.	Perencanaan dan Manajemen Risiko	2.097.299.240	5.667.022.840	5.167.022.840
6.	SDM dan Pengadaan	180.909.948.000	181.904.795.000	136.206.230.812
7.	Hukum dan Kepatuhan	13.717.117.000	10.595.773.404	4.315.773.404
8.	Internal Audit	1.556.097.760	1.555.745.760	925.022.500
9.	Sekban	3.629.320.000	9.186.591.119	6.553.861.125
10.	Sekdewas	11.766.033.000	12.068.651.819	11.206.070.154
	Total	274.999.846.000	282.439.843.942	205.696.967.335

BAB III

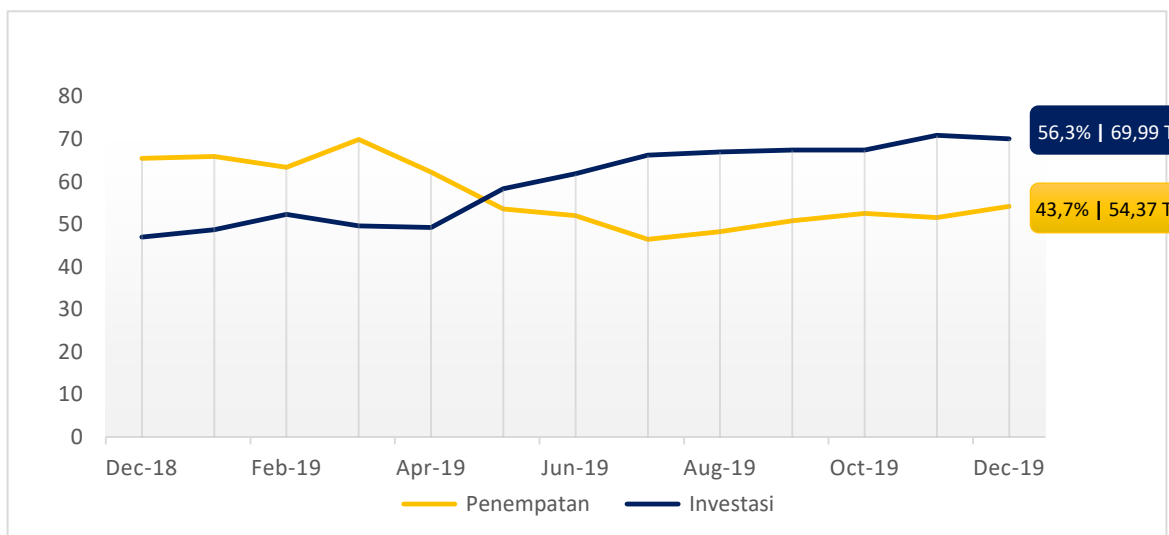
ANALISIS KINERJA BPKH

DANA HAJI

BPKH selalu berupaya untuk meningkatkan dana haji yang dikelola. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya posisi dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp124,28 triliun pada bulan Desember 2019, meningkat sebesar Rp1,87 triliun dari posisi bulan November 2019 yang tercatat sebesar Rp122,41 triliun, atau meningkat Rp11,93 triliun dari posisi bulan Desember 2018 sebesar Rp112,35 triliun.

Alokasi dana haji terkonsentrasi 43,7% pada penempatan dana di BPS-BPIH atau sebesar Rp54,30 triliun dan 56,3% pada investasi atau sebesar 69,99 triliun. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun selama BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. Untuk selanjutnya setelah 3 (tahun) BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji.

Berikut kami sampaikan gambar perbandingan komposisi dari Januari-Desember 2019.



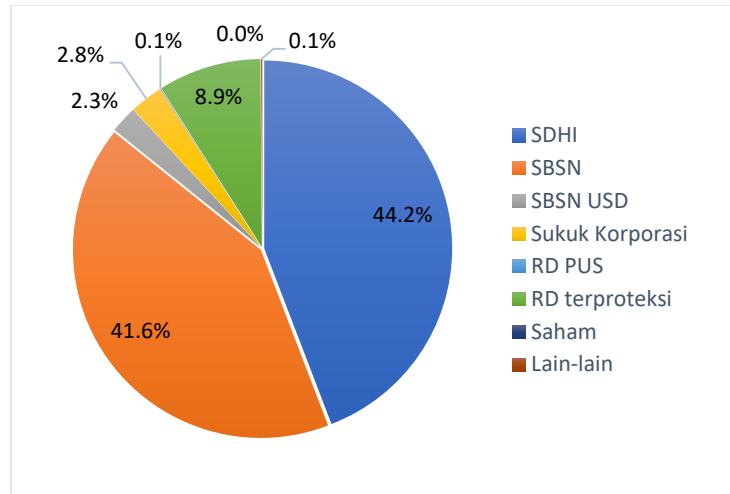
Gambar 1. Komposisi Investasi dan Penempatan Dana Haji

Dana haji tersebar pada BPS-BPIH, informasi mengenai posisi saldo penempatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1. Posisi Sebaran Dana Haji (Penempatan)
pada BPS BPIH bulan Desember 2019**

No.	BPS BPIH	JUMLAH
1	Bank Syariah Mandiri	12.802.909.262.869
2	BRI Syariah	10.698.533.290.481
3	BNi Syariah	5.450.460.039.335
4	Bank Muamalat Indonesia	7.452.434.896.765
5	Bank Tabungan Negara Syariah	4.578.394.409.321
6	Bank Permata Syariah	1.416.963.725.496
7	Bank Cimb Niaga Syariah	3.980.133.820.580
8	Bank Mega Syariah	1.691.701.319.774
9	Bank Panin Dubai Syariah	1.232.637.598.711
10	Bank Jatim Syariah	764.211.898.753
11	Bank Sumut Syariah	442.183.590.106
12	Bank Jateng Syariah	372.875.542.197
13	Bank Aceh Syariah	363.385.175.522
14	Bank Sumsel Babel Syariah	354.269.943.657
15	Bank Nagari Syariah	188.618.078.990
16	Bank Riau Kepri Syariah	678.766.597.988
17	Bank OCBC Nisp	1.825.713.864
18	BTPN Syariah	5.812.405.078
19	Maybank Syariah	53.920.526.014
20	Bank DKI Syariah	192.699.782.910
21	Bank Danamon	46.576.589.381
22	Bank Kaltim	29.791.049.448
23	Bank BCA Syariah	15.212.260.074
24	Bank Bukopin	10.797.118.076
25	Bank Sinarmas	86.064.329.161
26	Bank Jambi UUS	206.820.734.642
27	Bank Kalsel UUS	27.187.068.862
28	Bank Kalbar UUS	9.485.545
29	Bank NTB Syariah	1.042.997.419.082
30	Bank Jabar Banten Syariah	49.277.316.782
31	Bank DIY	10.622.377.917
32	Bank Sulselbar	50.000.000.000
Jumlah		54.298.093.367.380

Sepanjang tahun 2019 telah dilakukan pembelian/penempatan investasi pada instrumen surat berharga sebesar Rp27,6 triliun yang sebelumnya berjumlah Rp12,7 triliun di tahun 2018. Pembelian instrumen investasi tersebut dalam rangka pencapaian nilai manfaat sesuai dengan target RKAT-P dan juga reinvestasi atas instrumen investasi yang jatuh tempo pada tahun 2019 sebesar Rp6,2 triliun dibandingkan Rp3 triliun pada tahun 2018.



Gambar 2. Alokasi Pelaksanaan Investasi Tahun 2019

Tabel 3.2. Alokasi Investasi BPKH

No.	Investasi	Jumlah
A	Per Jangka Waktu	69,985,795,356,848
	Jangka Pendek	8,850,000,000,000
	Jangka Panjang	61,135,795,356,848
B	Per Jenis Produk	69,985,795,356,848
	Sukuk	42,986,469,723,070
	Reksadana	26,975,016,930,778
	Penyertaan	24.308.703.000
C	Per Sumber Kas	69,985,795,356,848
	Setoran Jemaah Haji	66,730,596,653,848
	DAU	3,255,198,703,000

Berikut merupakan detail rekapitulasi pelaksanaan investasi selama Januari-Desember 2019 yang tertuang dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Pelaksanaan Investasi tahun 2019

Instrument	Coupon	Yield	Nominal
PBS002	4.00%	4.00%	USD 100,000,000
PBS021 - DAU	8.50%	8.03%	1,142,296,000,000
PBS021	8.50%	8.03%	1,857,704,000,000
SIPPLN03BCN3	9.10%	9.10%	144,000,000,000
SIPPLN03CCN3	9.35%	9.35%	144,000,000,000
PBS021	8.50%	8.16%	494,712,000,000
PBS021	8.50%	8.13%	75,000,000,000
PBS021	8.50%	8.10%	225,000,000,000
PBS021	8.50%	8.09%	600,000,000,000
PBS021	8.50%	8.13%	100,000,000,000
PBS021	8.50%	8.06%	500,000,000,000
PBS021	8.50%	8.10%	225,000,000,000
PBS021	8.50%	8.03%	75,000,000,000
SMSMII01BCN2	8.50%	8.50%	300,000,000,000
PBS012 – DAU	8.88%	8.10%	641,594,000,000
PBS023	8.13%	8.15%	3,000,000,000,000
PBS012	8.88%	8.50%	3,000,000,000,000
PBS024	8.38%	8.55%	1,500,000,000,000
PBS025	8.38%	8.60%	1,500,000,000,000
PBS024	8.38%	8.29%	1,500,000,000,000
PBS025	8.38%	8.34%	1,500,000,000,000
PBS025	8.38%	8.04%	3,000,000,000,000
RDPUS -BNI AM	7.85%	6.28%	300,000,000,000
RDPUS - DIM	7.89%	6.31%	300,000,000,000
SIPPLN03ACN4	8.00%	8.00%	250,000,000,000
SIPPLN03BCN4	8.50%	8.50%	250,000,000,000
Sukuk BNGA Tahap II Seri B	7.90%	7.90%	235,000,000,000
Sukuk BNGA Tahap II Seri C	8.25%	8.25%	240,000,000,000
Sukuk SMI Tahap III Seri B	7.80%	7.80%	70,000,000,000
Sukuk SMI Tahap III Seri C	8.10%	8.10%	70,000,000,000
Sukuk SMI Tahap III Seri D	8.50%	8.50%	40,000,000,000
RDST Batavia Proteksi Syariah Misbah II	8.00%	8.00%	1,247,165,492,201
RDST RHB Dana Misbah II	8.00%	8.00%	130,952,976,418
RDST Eastpring Misbah	8.00%	8.00%	1,545,424,500,000
Total IDR	8.39%	8.18%	26,202,848,968,619
Total USD			USD 100,000,000
Total Eq IDR			27,602,848,968,619

Secara umum, profil risiko atas investasi BPKH adalah rendah (*low*) di mana saat ini mayoritas dari dana kelolaan investasi ditempatkan pada surat berharga syariah negara yang pembayarannya dijamin oleh negara berdasarkan Undang-Undang. Berikut merupakan ringkasan profil risiko Portfolio investasi BPKH:

Tabel 3.4. Ringkasan Profil Risiko Portfolio Investasi BPKH

Instrumen	Profil Risiko	Keterangan
SDHI	<i>Low</i>	Pembayaran dijamin oleh Undang-Undang
SBSN	<i>Low</i>	Pembayaran dijamin oleh Undang-Undang
Sukuk Korporasi	<i>Low to Moderate</i>	Keseluruhan memiliki peringkat idAAA, menunjukkan kapabilitas yang sangat baik dan risiko <i>default</i> yang rendah
RD Pasar Uang Syariah (RDPUS)	<i>Low to Moderate</i>	<i>Underlying</i> Deposito pada Bank Syariah / UUS dan Sukuk Korporasi dengan rating AAA
RD Terproteksi Syariah (RDTs)	<i>Low to Moderate</i>	<i>Underlying</i> berupa SBSN
Penyertaan Saham	<i>Moderate</i>	Serah terima dari Kementerian Agama

Surat Berharga Negara

BPKH memiliki dua jenis instrumen sukuk negara yaitu dalam bentuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang bersifat *non-tradeable* dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dapat diperdagangkan. Intensi kepemilikan untuk sukuk negara tersebut saat ini diperuntukkan untuk dipegang sampai dengan jatuh tempo (HTM) untuk menyesuaikan dengan kewajiban masa depan BPKH. BPKH juga memiliki instrumen SBSN dalam mata uang USD sejumlah USD200 juta yang dibeli pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019.

Tabel 3.5. Rincian Instrumen SDHI yang dimiliki BPKH

Instrumen	Maturity	Rp (miliar)
SDHI 2022 A - DAU	21-Mar-22	447
SDHI 2029 A - DAU	25-Mar-29	1.000
SDHI 2020 C	3-Jan-20	3.000
SDHI 2020 E	21-Mar-20	2.000
SDHI 2020 A	27-Apr-20	1.500
SDHI 2020 B	28-Jun-20	1.000
SDHI 2020 D	29-Jun-20	1.000
SDHI 2021 A	11-Apr-21	2.000
SDHI 2021 B	17-Oct-21	3.000
SDHI 2022 B	11-Feb-22	2.000
SDHI 2022 A	21-Mar-22	2.895
SDHI 2023 A	4-Nov-23	1.500
SDHI 2024 A	11-Feb-24	2.000
SDHI 2025 A	8-Jul-25	2.000
SDHI 2029 B	13-Aug-29	2.855
Total		28.197

Tabel 3.6. Rincian Instrumen SBSN yang dimiliki BPKH

Instrumen	Maturity	Rp (miliar)	Counterpart
PBS 021 -DAU	15-Nov-26	1,142.3	DJPPR
PBS 012 -DAU	15-Nov-31	641.6	
PBS006	15-Sep-20	150.0	
PBS006	15-Sep-20	100.0	
PBS006	15-Sep-20	100.0	
PBS018	15-May-28	2,000.0	
PBS018	15-May-28	1,000.0	

Instrumen	Maturity	Rp (miliar)	Counterpart
PBS017	15-Oct-25	500.0	
PBS003	15-Jan-27	200.0	
PBS003	15-Jan-27	500.0	
PBS020	15-Oct-27	200.0	
PBS020	15-Oct-27	500.0	
PBS020	15-Oct-27	200.0	DJPPR
PBS021	15-Nov-26	857.7	
PBS021	15-Nov-26	494.7	
PBS021	15-Nov-26	75.0	
PBS021	15-Nov-26	225.0	
PBS021	15-Nov-26	100.0	
PBS021	15-Nov-26	500.0	
PBS021	15-Nov-26	225.0	
PBS021	15-Nov-26	75.0	
PBS012	15-May-30	1,400.0	
PBS024	15-May-32	300.0	
PBS025	15-May-33	1,000.0	
Total		12,486.3	

Tabel 3.7. Rincian Instrumen SBSN USD yang dimiliki BPKH

Instrumen	Nominal USD juta
USDPBS001	100
USDPBS002	100
Total	200

Sukuk Korporasi

Sukuk Korporasi yang dimiliki oleh BPKH seluruhnya memiliki peringkat ^{id}AAA yang mencerminkan risiko yang rendah. Mayoritas sukuk korporasi yang dimiliki oleh BPKH diterbitkan oleh PLN sebesar Rp1,08 triliun atau dengan total kontribusi sebesar 46,4% dari total sukuk korporasi yang dimiliki BPKH.

Tabel 3.8. Sukuk Korporasi yang dimiliki BPKH

Instrumen	Maturity	Rp (miliar)	Counterpart
Sukuk SMI Tahap I Seri A	06-Jul-23	100	SMI
Sukuk PLN Tahap II Seri B	10-Jul-25	150	PLN
Sukuk PLN Tahap II Seri C	10-Jul-28	150	PLN
Sukuk CIMN Niaga Tahap I Seri A	25-Nov-19	-	Bank CIMB Niaga
Sukuk CIMB Niaga Tahap I Seri B	15-Nov-21	200	Bank CIMB Niaga
Sukuk PLN Tahap III Seri B	19-Feb-24	144	PLN
Sukuk PLN Tahap III Seri C	19-Feb-26	144	PLN
Sukuk SMI Tahap II Seri B	21-Mar-22	300	SMI
Sukuk PLN Tahap IV Seri A	01-Aug-24	250	PLN
Sukuk PLN Tahap IV Seri B	01-Aug-26	250	PLN
Sukuk BNGA Tahap II Seri B	21-Aug-22	235	Bank CIMB Niaga
Sukuk BNGA Tahap II Seri C	21-Aug-24	240	Bank CIMB Niaga
Sukuk SMI Tahap III Seri B	28-Aug-22	70	SMI

Instrumen	Maturity	Rp (miliar)	Counterpart
Sukuk SMI Tahap III Seri C	28-Aug-24	70	SMI
Sukuk SMI Tahap III Seri D	28-Aug-26	40	SMI
Total		2.343	

Selain itu, BPKH juga memiliki sukuk korporasi yang dimasukkan dalam skema reksadana pasar uang syariah untuk mengoptimalkan imbal hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9. Sukuk Korporasi RDPUS yang dimiliki BPKH

No	Instrumen Investasi	Keterangan	% Kupon	Yield	Nominal (Rp miliar)
1	Sukuk SMF I Tahap I	Underlying RDPUS	7.50%	7.12%	20
2	Sukuk BNGA Tahap II Seri A	Underlying RDPUS	7.10%	6.74%	105
3	Sukuk SMI Tahap III Seri A	Underlying RDPUS	7.00%	6.64%	185
	Total		7.07%	6.70%	310

Reksadana Terproteksi Syariah

BPKH telah melakukan investasi pada instrumen reksadana terproteksi syariah untuk mengoptimalkan imbal hasil dengan beberapa manajer investasi mitra BPKH, di mana *underlying* atas reksadana tersebut adalah SBSN. Tabel 2.14 merupakan posisi investasi RDTS pada akhir Desember 2019:

Tabel 3.10. Rincian Instrumen Reksadana Terproteksi Syariah

Instrumen RDTS	NAV 31 Desember 2019
RDST Syailendra Misbah	1,609.68
RDST BNI AM Misbah I	1,603.61
RDST Bahana Misbah Syariah	1,618.93
RDST RHB Dana Misbah	873.50
RDST Manulife Misbah	1,611.48
RDST SAM Dana Misbah Syariah	1,657.88
RDST Danareksa Dana Misbah	1,612.79
RDST Misbah Mandiri Syariah Seri 184	1,546.01
RDST BNP Paribas Misbah Rupiah	1,599.60
RDST Principal CPF Misbah Syariah	1,558.67
RDST Batavia Proteksi Syariah Misbah	1,606.96
RDST Maybank CPF Misbah Syariah 1	1,594.22
RDST PNMIM	1,610.87
Total	23,045.31

Reksadana Pasar Uang Syariah

BPKH memiliki 3 instrumen reksadana pasar uang syariah dengan total kepemilikan sebesar Rp1,15 triliun pada tanggal 30 Desember 2019. *Underlying* untuk reksadana pasar uang syariah ini adalah deposito pada BPS BPIH dan Sukuk Korporasi di bawah 1 tahun.

Imbal hasil bersih yang diperoleh dari instrumen RDPUS dengan rata-rata sebesar 6,33% p.a lebih baik jika dibandingkan dengan imbal hasil deposito sebesar 5,60% p.a.

Tabel 3.11 Rincian Instrumen Reksadana Pasar Uang Syariah

Nama Reksadana	Settlement	Subscription	NAV 30 Des 2019	Imbal Hasil Net	Imbal Hasil Gross	Underlying
RDPUS PNM Arafah	21-Dec-18	500.0	530.4	6.47%	7.79%	Deposito & Sukuk (30%)
RDPUS BNIAM	27-Jun-19	300.0	309.4	6.13%	7.38%	Deposito & Sukuk (26%)
RDPUS DIM	27-Jun-19	300.0	309.7	6.31%	7.60%	Deposito & Sukuk (25%)
TOTAL		1,100.0	1,149.5	6.33%	7.63%	

Penyertaan Saham

Penyertaan saham di Bank Muamalat Indonesia yang merupakan serah terima dari Kementerian Agama senilai Rp24,3 miliar yang dikategorikan sebagai investasi dana abadi umat (DAU).

Penambahan Calon Jemaah Haji Baru

Selain fokus dengan pelaksanaan kegiatan penempatan dana dan investasi, proses penambahan dana haji yang dikelola oleh BPKH tetap menjadi prioritas yang utama. Diantaranya, melalui upaya penambahan jumlah pendaftar haji baru yang tentunya akan menambah jumlah dana haji yang dikelola.

Penambahan jumlah pendaftar calon jemaah haji baru secara akumulatif dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebanyak 748.114 orang. Jumlah pendaftar tersebut terbagi ke calon jemaah haji regular sebanyak 731.563 orang dan 16.551 orang untuk calon jemaah haji khusus. Pencapaian target secara proporsional adalah sebesar 115,1% dari target total 2019 sebanyak 650.000 orang.

Penambahan jumlah calon jemaah haji tersebut berpengaruh terhadap penambahan jumlah dana haji yang diperoleh dari setoran awal calon jemaah haji baru, baik jemaah haji regular maupun khusus. Secara akumulatif s.d. bulan Desember 2019 penambahan dana haji bertambah sebesar Rp19,21 triliun dengan pencapaian sebesar 118,2% dari target penambahan dana haji yang berasal dari setoran awal total tahun 2019 yaitu sebesar Rp16,25 triliun. Tabel 3.12 dan 3.13 di bawah, merupakan informasi mengenai jumlah penambahan dana haji dan calon jemaah haji.

Tabel 3.12 Penambahan Dana Haji Baru s.d bulan Desember 2019

No	Jenis Calon Jemaah Haji	Target	Realisasi	%
1	Reguler (Rp triliun)	16,25	18,29	118,2
2	Khusus (Rp miliar)	-	923,21	
	Total (Rp triliun)	16,25	19,21	118,2

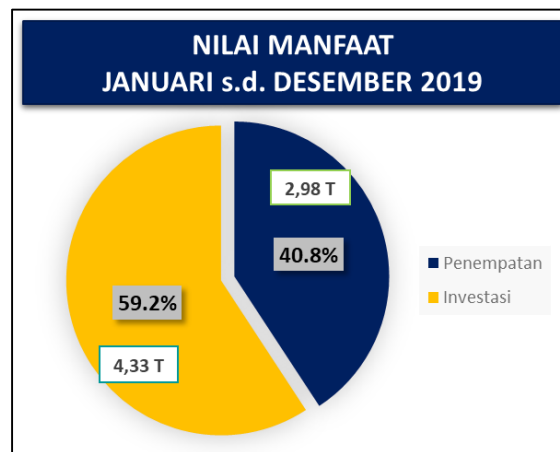
Tabel 3.13 Penambahan Jumlah Calon Jemaah Haji Baru s.d. bulan Desember 2019

No	Jenis Calon Jemaah Haji	Target 2019	Realisasi	%
1	Reguler	650.000	731.563	115,1
2	Khusus	-	16.551	
	Total	650.000	748.114	115,1

NILAI MANFAAT

Perolehan nilai manfaat pada tahun 2019 tercatat melebihi target (dari total target sebesar Rp7,22 triliun) yaitu sebesar Rp7,31 triliun atau sebesar 101,2%. Nilai manfaat tersebut diperoleh dari hasil penempatan BPS-BPIH yaitu sebesar Rp2,98 triliun dan hasil investasi sebesar Rp4,33 triliun (termasuk DAU).

Rincian mengenai nilai manfaat per instrumen per bulan Desember tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

**Gambar 3. Nilai Manfaat per Instrumen**

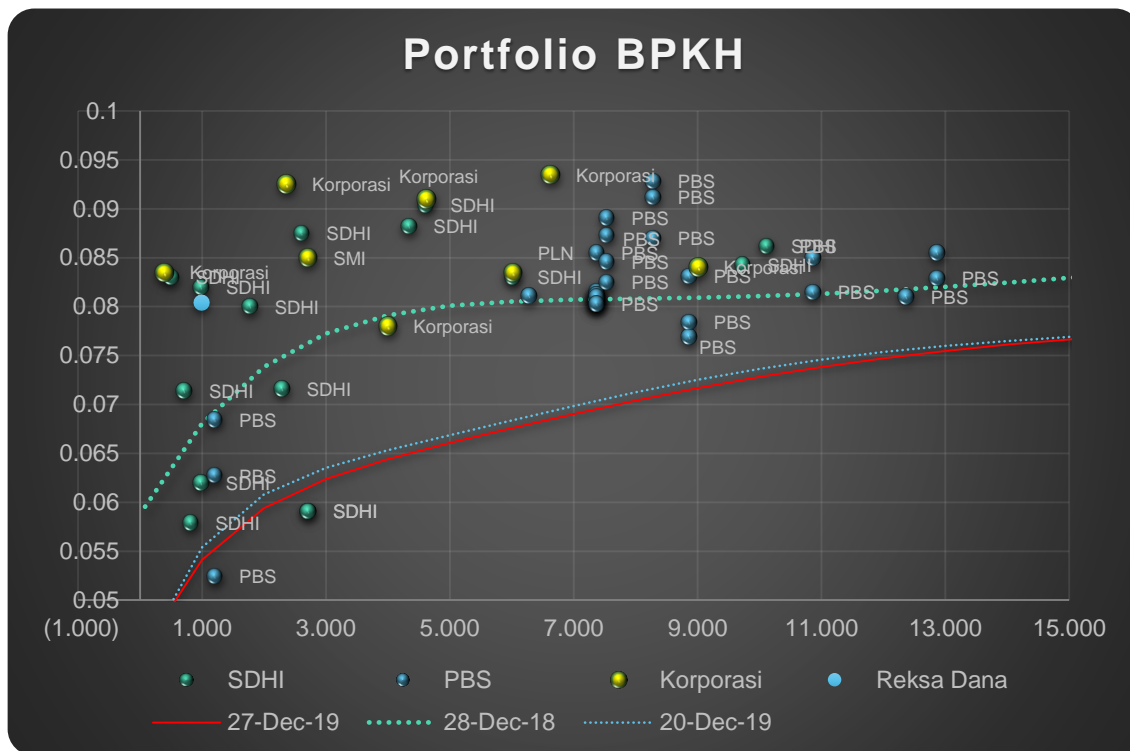
PENCAPAIAN TARGET BISNIS BPKH 2019

Sampai dengan bulan Desember tahun 2019, pencapaian target bisnis BPKH tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Pencapaian Target Bisnis BPKH s.d. bulan Desember Tahun 2019

No.	Deskripsi	Target 2019	Realisasi 2019	%	Deviasi pencapaian (%)
1.	Total Dana Haji yang Dikelola	122,16 triliun	124,28 triliun	101,7	1,7
2.	Jumlah Pendaftar Calon Jemaah Haji Baru				
	Reguler	650.000	731.563	115,1	15,1
	Khusus	-	16.551		
3.	Tambahan Dana Haji Baru	16,25 triliun	19,21 triliun	118,2	18,2
4.	Pendapatan	7,22 triliun	7,31 triliun (*accrual basis)	101,2	1,2
	Penempatan Dana	2,87 triliun	2,98 triliun	103,7	3,7
	Investasi	4,35 triliun (*pembulatan)	4,33 triliun	99,5	(0,5)
5.	Pengeluaran				
	Virtual Account	1,08 triliun	-	-	-
	Kemaslahatan*	177,13 miliar	171,55 miliar* (accrual basis)	96,8	(03,2)
	Kemaslahatan	177,13 miliar	156,55 miliar (cash basis)	88,4	(11,6)
	Operasional BPKH	205,69 miliar	171,30 miliar	83,3	(23,3)
	BPIH tambahan 10 ribu Jemaah		76,75 miliar		
	Operasional BPKH+BPIH tambahan 10 ribu Jemaah	282,44 miliar	248,05 miliar	87,8	(12,2)
6.	Rasio Likuiditas BPIH	200%	200%	100	-
7.	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan Jemaah Haji	76%	77%	101,3	1,3
8.	Persentase <i>Indirect Cost</i> BPIH terhadap Nilai Manfaat Tahunan	80%	100%	136,9	36,9
9.	<i>Brand Equity</i>	74%	80%	117,6	17,6
10.	Persentase <i>Coverage Ratio Virtual Account (existing)</i>	100%	100%	100,0	-
11.	Rasio <i>turnover</i> Pegawai	<10%	6,7%	100%	-

Posisi portfolio instrumen investasi BPKH secara umum dapat dilihat dari gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Yield Portfolio Investasi BPKH vs benchmark yield

Pada Tabel 3.15 di bawah, digambarkan mengenai rincian perolehan nilai manfaat dari investasi s.d. bulan Desember tahun 2019.

Tabel 3.15 Rincian Nilai Manfaat Investasi s.d. bulan Desember tahun 2019

Nilai Manfaat (Rp miliar)	YTD Desember 2019
SDHI	1.918,82
SBSN Rp	843,76
SBSN USD	95,07
Sukuk Korporasi	123,61
Reksadana PUS	3,05
Reksadana TS	385,01
Penyertaan Saham	0,28
Capital Gain Penjualan Sukuk	734,90
Accrued Imbal Hasil Sukuk	219,60
Lainnya	5,19
Total	4.329,29

Perolehan nilai manfaat dari hasil penempatan dana haji tersebar di BPS-BPIH, berikut total nilai manfaat secara akumulatif sampai dengan bulan Desember 2019 seperti pada tabel 3.16 di bawah ini.

**Tabel 3.16 Kontribusi BPS-BPIH
Terhadap Nilai Manfaat Penempatan s.d. bulan Desember 2019**

No.	BPS BPIH	TOTAL
1	Bank Syariah Mandiri	764,678,367,716
2	BRI Syariah	675,659,840,617
3	BNi Syariah	274,901,256,197
4	Bank Muamalat Indonesia	341,044,186,887
5	Bank Tabungan Negara Syariah	268,846,610,009
6	Bank Permata Syariah	70,929,627,648
7	Bank Cimb Niaga Syariah	197,262,642,735
8	Bank Mega Syariah	80,238,906,804
9	Bank Panin Dubai Syariah	75,098,725,488
10	Bank Jatim Syariah	48,218,234,538
11	Bank Sumut Syariah	31,207,328,264
12	Bank Jateng Syariah	28,161,600,818
13	Bank Aceh Syariah	24,402,378,819
14	Bank Sumsel Babel Syariah	26,147,044,384
15	Bank Nagari Syariah	16,322,246,491
16	Bank Riau Kepri Syariah	40,081,951,602
17	Bank OCBC Nisp	5,441,734,673
18	BTPN Syariah	5,226,291,166
19	Maybank Syariah	7,651,883,882
20	Bank DKI Syariah	4,217,201,248
21	Bank Danamon	3,123,100,961
22	Bank Kaltim	1,415,939,235
23	Bank BCA Syariah	666,769,617
24	Bank Bukopin	645,934,756
25	Bank Sinarmas	2,484,436,272
26	Bank Jambi UUS	14,459,987,098
27	Bank Kalsel UUS	871,993,933
28	Bank Kalbar UUS	628,493,151
29	Bank NTB Syariah	23,090,344,008
30	Bank Jabar Banten Syariah	1,571,135,592
31	Bank DIY	226,954,733
Jumlah		3,034,923,149,342
Accrue per 31 Des 2018		(130,653,318,558)
Accrue per 31 Des 2019		72,389,284,952
Jumlah		2,976,659,115,736

RESUME PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BPKH 2019

Secara umum, gambaran utuh mengenai pengelolaan keuangan haji yang dilaksanakan oleh BPKH hingga bulan Desember 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17 Resume Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Desember 2019 (Rp.Miliar)

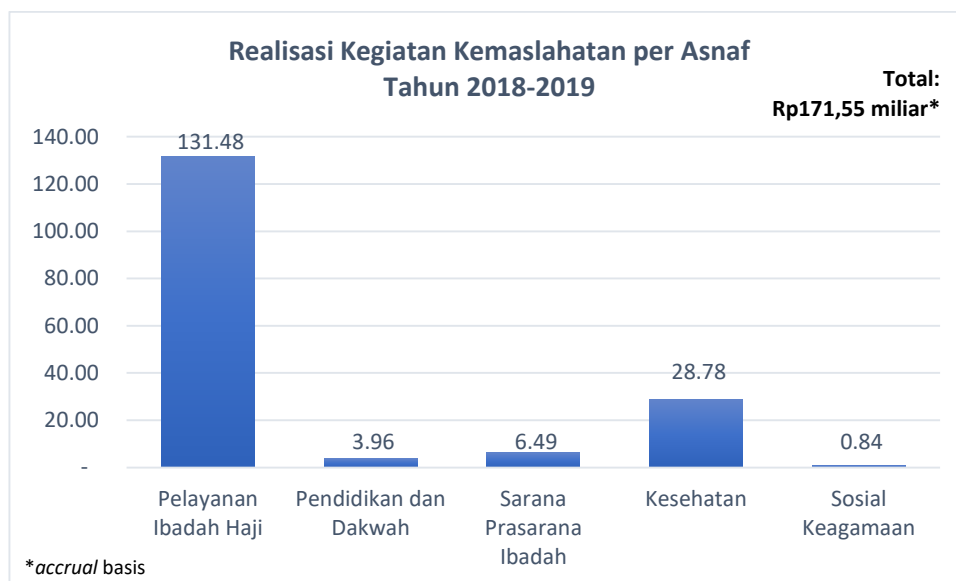
Total Dana Haji yang Dikelola	Dana Haji yang Ditempatkan			Nilai Manfaat dari Penempatan			Dana Haji yang Diinvestasikan			Nilai Manfaat dari Investasi		
	Produk	Nilai	Bank	Produk	Nilai Manfaat	Bank	Instrumen	Jumlah	Nilai	Instrumen	Jumlah	Nilai
124.283,88	Tabungan	850,61	1 Bank	Tabungan	25,37	1 Bank	SDHI	15 seri	28.197,00	SDHI	15 seri	1.918,82
	Deposito	53.160,85	30 Bank	Deposito	2.947,15	31 Bank	SBSN Rp	24 seri	12.446,47	SBSN Rp	24 seri	843,76
	Giro	286,63	31 Bank	Giro	3,70	27 Bank	SBSN USD	2 seri	2.780,20	SBSN USD	2 seri	95,07
							Sukuk Korporasi	15 seri, 3 Korp	2.343,00	Sukuk Korporasi	15 seri, 3 Korp	123,61
							Reksadana PUS	3 MI	1.149,51	Reksadana PUS	3 MI	3,05
							Reksadana TS	16 MI	23.045,31	Reksadana TS	16 MI	385,01
							Penyertaan Saham	1 Korp (BMI)	24,30	Penyertaan Saham	1 Korp (BMI)	0,28
							Lainnya	-		Capital Gain Penjualan Sukuk	-	734,90
										Accrued Imbal Hasil Sukuk	-	219,60
										Lainnya	-	5,19
		54.298,09	31 Bank		2.976,23	31 Bank			69.985,79			4.329,29

PROGRAM KEMASLAHATAN

Distribusi penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) mengalami perubahan target kelompok sasaran, dari sebelumnya 8 (delapan) kelompok atau *asnaf* pada awal terbentuknya BPKH, menjadi 6 (enam) kelompok pada saat direalisasikan tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019. Enam kelompok kegiatan yang menjadi sasaran dalam program penyaluran nilai manfaat dari DAU adalah: Pelayanan Haji; Pendidikan dan Dakwah; Kesehatan; Sarana Prasarana Ibadah; Ekonomi Umat; dan Sosial Keagamaan.

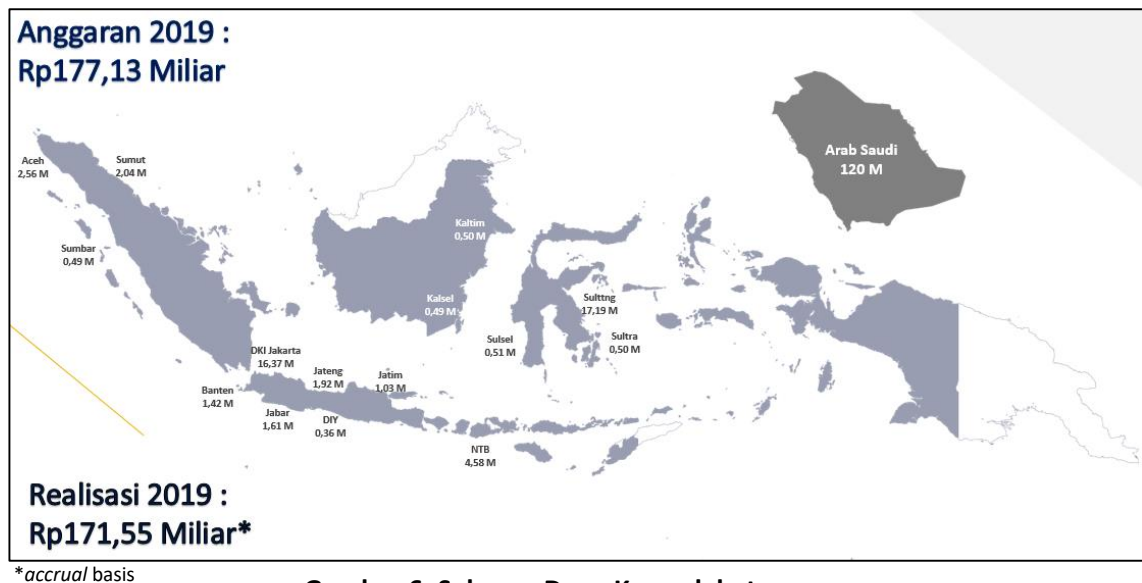
Sampai dengan bulan Desember 2019, realisasi kegiatan kemaslahatan sudah terserap sebesar 96,8% atau sebesar Rp171,55 miliar (*accrual basis*) apabila dibandingkan dengan target sebesar Rp177,13 miliar. Namun, secara perhitungan *cash basis*, penyerapan kegiatan kemaslahatan adalah sebesar 88,4% atau sebesar Rp156,55 miliar, hal ini disebabkan oleh tertundanya proses penyaluran kegiatan kemaslahatan sebesar Rp15 miliar dalam bentuk dana bergulir temporer Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS). CWLS akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020, karena harus menunggu jumlah *exposure* sebesar Rp50 miliar. Oleh karena itu, pencatatan pada laporan keuangan masih menggunakan angka Rp156,55 miliar.

Selanjutnya, dari realisasi program kemaslahatan tersebut, 76,6% dari seluruh anggaran kemaslahatan atau sebesar Rp131,48 miliar, telah digunakan sebagai penambahan fasilitas jemaah lanjut usia dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya beberapa *asnaf* yang sudah menerima distribusi nilai manfaat DAU adalah: Pendidikan dan Dakwah sebesar Rp3,96 miliar (2,3%); Sarana Prasarana Ibadah sebesar Rp6,49 miliar (3,8%); Kesehatan Rp28,78 miliar (16,8%) (Rp15 miliar dilaksanakan pada bulan Januari 2020); dan Sosial Keagamaan sebesar Rp0,84 miliar (0,5%).



Gambar 5. Realisasi Kegiatan Kemaslahatan

Distribusi program kemaslahatan juga mempertimbangkan pemerataan lokasi geografis, dimana sampai dengan bulan Desember 2019 penyebarannya telah mencakup lima belas provinsi seperti pada gambar berikut:



Gambar 6. Sebaran Dana Kemaslahatan

Berikut selanjutnya rincian distribusi program kemaslahatan pada tabel 3.18.

Tabel 3.18 Distribusi Program Kemaslahatan Tahun 2018-2019

No.	Nama Penerima	Lokasi	Asnaf	Nilai
1	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Pendidikan dan Dakwah	Rp91,100,000
2	Laz Ummul Quro	Jawa Timur	Sarana Prasarana Ibadah	Rp481,100,000
3	Yayasan Insan Cendekia Madani Jawa Barat	Jawa Barat	Sosial Keagamaan	Rp119,400,000
4	Laznas BSM	NTB	Kesehatan	Rp195,000,000
5	Yayasan Al-Utsmani	DKI Jakarta	Pendidikan dan Dakwah	Rp99,000,000
6	DKM Al Ihsan Darul Hikam	Jawa Barat	Sarana Prasarana Ibadah	Rp54,152,000
7	UPT Asrama Haji Yogyakarta 1	DIY	Pelayanan Haji	Rp162,530,000
8	UPT Asrama Haji Yogyakarta 2	DIY	Pelayanan Haji	Rp131,140,000
9	Yayasan Pondok Pesantren An-Nuur Sumedang	Jawa Barat	Pelayanan Haji	Rp152,500,000
10	Yayasan Pondok Pesantren TPI Balakka	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp186,578,300
11	Yayasan Satya Buana Konawe Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya	Sulawesi Tenggara	Pendidikan dan Dakwah	Rp500,000,000
12	Solo Peduli	Jawa Tengah	Kesehatan	Rp474,830,000
13	Yayasan Pondok Pesantren Al Mukhlisin	Sumatera Utara	Pelayanan Haji	Rp65,500,000
14	Yayasan Nurul Huda Cakul	Jawa Timur	Pendidikan dan Dakwah	Rp16,852,000
15	Yayasan Tarbiyatus Sholihin	Jawa Timur	Sosial Keagamaan	Rp45,000,000
16	UPT Asrama Haji Lombok	NTB	Pelayanan Haji	Rp3,350,156,000
17	Al Jamiyatul Washliyah	Jawa Barat	Sosial Keagamaan	Rp198,640,000
18	Yayasan Al Furqon Madina	Sumatera Utara	Pelayanan Haji	Rp62,500,000
19	UPT Asrama Haji Jakarta 1	DKI Jakarta	Pelayanan Haji	Rp126,500,000
20	UPT Asrama Haji Jakarta 2	DKI Jakarta	Pelayanan Haji	Rp471,350,000

No.	Nama Penerima	Lokasi	Asnaf	Nilai
21	Nasyiatul Aisyiah	DIY	Sosial Keagamaan	Rp68,200,000
22	BKM Masjid Istiqlal	DKI Jakarta	Kesehatan	Rp494,500,000
23	ALPPIND	DKI Jakarta	Sosial Keagamaan	Rp90,000,000
24	YPI Al Hijrah Bintuju	Sumatera Utara	Pelayanan Haji	Rp62,500,000
25	Daarut Tauhid Peduli 1	Jawa Barat	Sarana Prasarana Ibadah	Rp196,673,000
26	Daarut Tauhid Peduli 2	NTB	Kesehatan	Rp494,450,000
27	MTS Wonoyoso	Jawa Tengah	Pendidikan dan Dakwah	Rp150,000,000
28	Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Nagasaribu	Sumatera Utara	Pelayanan Haji	Rp82,520,000
29	Mandiri Amal Insani	Sulawesi Tengah	Kesehatan	Rp192,070,000
30	UPT Asrama Haji Aceh 1	Aceh	Pelayanan Haji	Rp1,131,000,000
31	UPT Asrama Haji Aceh 2	Aceh	Pelayanan Haji	Rp1,425,000,000
32	Yayasan Darul Hasan Kota Padangsidempuan	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp123,700,000
33	Yayasan Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah Nagasaribu	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp123,700,000
34	Yayasan Madrasah GUPPI Malintang	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp123,700,000
35	Yayasan Al-Ikhlâs Madina Pesantren Darul Ikhlas	Sumatera Utara	Sosial Keagamaan	Rp46,310,000
36	Yayasan Pendidikan Islam Yaqubiyah	Sumatera Utara	Kesehatan	Rp111,400,000
37	PBNU	Jawa Barat	Sosial Keagamaan	Rp200,000,000
38	Yayasan As Syafi'iyah	Banten	Sosial Keagamaan	Rp75,000,000
39	Yayasan Sa'adatud Daroin Al Amir Kemiri (YAPSI AL AMIR)	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp142,650,000
40	Yayasan Al-Ikhlâs Madina Pesantren Darul Ikhlas	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp151,500,000
41	Yayasan Harum Bunga	DKI Jakarta	Sarana Prasarana Ibadah	Rp90,000,000
42	Panitia Pembangunan Masjid Mamba'ul Hisan Meteseh Sidoagung Tempuran Magelang	Jawa Tengah	Sarana Prasarana Ibadah	Rp199,943,000
43	Pondok Pesantren Darussalam	Jawa Tengah	Pendidikan dan Dakwah	Rp100,000,000
44	Panitia Pembangunan Masjid Ushuluddin Pongangan Ngadirejo Salaman Magelang	Jawa Tengah	Sarana Prasarana Ibadah	Rp57,485,000
45	Yayasan Lukman Al-Hakim	NTB	Sarana Prasarana Ibadah	Rp40,000,000
46	KBIH Armina	Jawa Tengah	Pendidikan dan Dakwah	Rp83,090,000
47	Pondok Pesantren Darul Falah Al-Burdah	Jawa Barat	Pendidikan dan Dakwah	Rp87,170,000
48	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI YAPATA Al-Jawami)	Jawa Barat	Pendidikan dan Dakwah	Rp40,050,000
49	Takmir Masjid Al-Ikhlâs	Jawa Tengah	Sarana Prasarana Ibadah	Rp134,986,750
50	Yayasan Ummul Quro Sasak	Banten	Sosial Keagamaan	Rp75,900,000
51	Yayasan Sa'adatud Daroin Al Amir Kemiri (YAPSI AL AMIR)	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp194,100,000
52	Yayasan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Ranto Baik	Sumatera Utara	Sosial Keagamaan	Rp37,820,000
53	Yayasan Madrasah Aliyah Persiapan Negeri Ranto Baik	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp112,600,000
54	Yayasan Pendidikan Islam Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Cilongok	Jawa Tengah	Pendidikan dan Dakwah	Rp199,993,500
55	Yayasan Pendidikan Islam Al Jauhariyah	Jawa Barat	Pendidikan dan Dakwah	Rp87,170,000
56	BKM Masjid Al Ikhlas	Sumatera Utara	Sarana Prasarana Ibadah	Rp80,455,000

No.	Nama Penerima	Lokasi	Asnaf	Nilai
57	Madrasah Ibtidaiyah Jam'iyatul Khair (Yayasan Pendidikan Islam Jam'iyatul Khair Kampung Utan)	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp120,000,000
58	Yayasan Pondok Pesantren Roihanul Jannah	Sumatera Utara	Pendidikan dan Dakwah	Rp188,600,200
59	PAUD Kober Al-Ikhlash Yayasan PKBM Tunas Pulosari	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp93,000,000
60	Yayasan Athurisin	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp142,000,000
61	Yayasan Darrul Muhtadi	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp150,000,000
62	Yayasan Miftahul Hidayah	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp150,000,000
63	Yayasan Pondok Pesantren As-Syamsiah Babakan Karet	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp90,000,000
64	Yayasan Al-Fadhilah Muncang	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp90,000,000
65	Yayasan Al-Awafi Cipanas	Banten	Pendidikan dan Dakwah	Rp100,000,000
66	UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp490,094,000
67	UPT Asrama Haji Embarkasi Padang	Sumatera Barat	Pelayanan Haji	Rp489,020,000
68	UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan	Kaltim	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp496,120,000
69	UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi	Jawa Barat	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp470,520,000
70	UPT Asrama Haji Embarkasi Medan	Sumatera Utara	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp479,020,000
71	UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok	NTB	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp498,111,991
72	Kementerian Agama	Arab Saudi	Jemaah haji Lansia/ Pelayanan Haji	Rp120,000,000,000
73	Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp518,000,000
74	UPT Asrama Haji Surabaya	Jawa Timur	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp484,000,000
75	UPT Asrama Haji Makassar	Sulawesi Selatan	Kendaraan Lansia/ Pelayanan Haji	Rp507,000,000
76.	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	DKI/Banten	Pengembangan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi*	Rp. 15.000.000.000
JUMLAH				Rp154.644.950.741

*) Dalam bentuk dana bergulir temporer Cash Waqaf Link Sukuk (CWLS)

Tabel 3.19 Program Kemaslahatan Terkait dengan Rehabilitasi Bencana PASIGALA (Palu, Sigi dan Donggala)

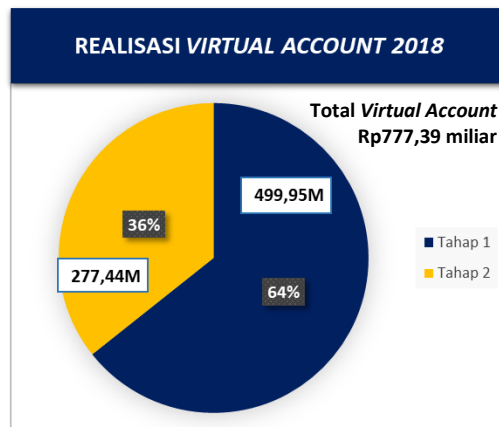
No.	Nama Penerima	Lokasi	Sarana/Prasarana	Nilai
1	Baznas	Sulawesi Tengah	Rumah Sakit Sitti Masyithah	Rp2.489.467.000
2	Baznas	Sulawesi Tengah	Ambulance	Rp622.675.000
3	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Rumah Sehat	Rp3.159.000.000
4	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Mesjid dan Kampu Haji	Rp347.033.000
5	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Klinik Kesehatan	Rp95.740.000
6	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Pelatihan Kewirausahaan	Rp111.184.000
7	Rumah Zakat	Sulawesi Tengah	Sarana Air Bersih	Rp647.690.000
8	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Mesjid Al Ikhlash	Rp2.004.658.000
9	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Rumah Sehat	Rp4.068.514.000
10	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Klinik Kesehatan	Rp105.290.000
11	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Sekolah Kreatif	Rp109.220.000
12	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Sarana Air Bersih	Rp647.180.000
13	Daarut Tauhid Peduli	Sulawesi Tengah	Taman Miniatur Ka'bah	Rp81.185.000
14	Lazismu	Sulawesi Tengah	Mesjid Nur Ilahi	Rp2.766.798.000
JUMLAH				Rp17.255.634.533

VIRTUAL ACCOUNT

Nilai manfaat tahun 2018 yang didistribusikan kepada jemaah tunggu melalui rekening virtual total adalah sebesar Rp777,39 miliar, dan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp499,95 miliar, didistribusikan pada tanggal 7 Februari 2019 kepada 4.041.702 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu reguler dan 91.084 rekening virtual milik calon haji jemaah tunggu khusus. Pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu reguler mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp94.288 (untuk setoran awal Rp20 juta) dan Rp117.860 (untuk setoran awal Rp25 juta); sedangkan pada masing-masing rekening virtual calon haji jemaah tunggu khusus mendapatkan distribusi nilai manfaat Rp198.033 (untuk setoran awal \$3000) dan Rp264.043 (untuk setoran awal \$4000). Tahap kedua sisanya Rp277,44 miliar telah didistribusikan kepada VA milik calon haji jemaah tunggu pada tanggal 7 Agustus 2019. Sedangkan distribusi nilai manfaat tahun 2019 ke rekening virtual calon haji jemaah tunggu dialokasikan sebesar Rp1,083 triliun dan akan dilakukan pada awal tahun 2020 setelah besaran nilai manfaat tahun 2019 diperoleh dan dicatat pada neraca BPKH.

**Tabel 3.20. Distribusi Nilai Manfaat (NM) melalui *Virtual Account* (VA)
Tahun 2018**

No	Deskripsi	Target 2018	Realisasi 2018	Periode Triwulan III 2019		
				Target	Real	%
1	Total NM	Rp6,07 triliun	Rp5,73 triliun	-	-	-
2	NM yg didistribusikan	20% dari NM 2018	Rp777,39 miliar	-	Rp499,95 miliar	-
3	Total VA	-	-	-	4.132.786 Rekening	-
	a. Reguler	-	-	-	4.041.702 Rekening	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	19.006 Rekening	-
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	4.022.696 Rekening	-
	b. Khusus	-	-	-	91.084 Rekening	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	146 Rekening	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	90.938 Rekening	-
4	NM per VA	-	-	-	Rp674.224,-	-
	a. Regular	-	-	-	Rp212.148,-	-
	Set. Awal Rp20 juta	-	-	-	Rp94.288,-	-
	Set. Awal Rp25 juta	-	-	-	Rp117.860,-	-
	b. Khusus	-	-	-	Rp462.076,-	-
	Set. Awal \$3000	-	-	-	Rp198.033,-	-
	Set. Awal \$4000	-	-	-	Rp264.043,-	-



Gambar 6. Realisasi *Virtual Account* 2018

KINERJA BIDANG

Sampai dengan bulan Desember 2019, secara umum masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disusun sebelumnya. Pencapaian *output* dan penyerapan anggaran s.d. bulan Desember 2019 sudah cukup mewakili kinerja BPKH secara institusi. Kinerja masing-masing bidang diukur melalui dua aspek, yaitu: persentase pencapaian terhadap rencana *output* dan persentase penyerapan atas rencana anggaran. Kombinasi antara pencapaian *output* yang optimal dengan penyerapan anggaran yang optimal juga, diharapkan mampu mendorong pencapaian target kinerja organisasi BPKH *wide*.

Berdasarkan hasil *self assessment* kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bidang, sampai dengan bulan Desember 2019 pencapaiannya bervariasi antara 98,1% hingga 144,2%. Pada skala BPKH *wide*, pencapaian *output* s.d. bulan Desember 2019 adalah sebesar 114,8%. Untuk penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2019, penggunaan anggarannya pun bervariasi juga antara 46,3% hingga 92,1% dari anggaran kegiatan-kegiatan yang secara proporsional diimplementasikan sampai dengan periode tersebut.

Beberapa pencapaian kinerja yang dapat di-*highlight* selama tahun 2019 adalah antara lain:

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPKH tahun 2018;
- BPKH memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dalam hal Proses penempatan dana, Proses investasi di surat berharga, Kegiatan Kemaslahatan, Proses pengembalian dana pembatalan, dan Proses audit internal;
- BPKH menggunakan prinsip *Four Eyes* dalam proses pengambilan keputusan pada Penempatan Dana, Investasi, dan Kegiatan Kemaslahatan;

- d) BPKH menggunakan *Balanced Scorecard* dalam melakukan penilaian Kinerja Unit dan Individu;
- e) BPKH telah mengembangkan virtual account bagi jemaah haji yang dapat diakses melalui <http://va.bpkh.go.id>; serta
- f) BPKH sedang membangun sistem yang terintegrasi antara Siskohat (DJPHU) dan BPS BPIH dengan Siskehat BPKH, Data Center BPKH, Data Recovery Center BPKH, dan Kantor Operasional BPKH.

Selanjutnya Rekap kinerja masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 3.21 dan tabel 3.22.

Tabel 3.21. Pencapaian *Output* per Bidang s.d. bulan Desember 2019

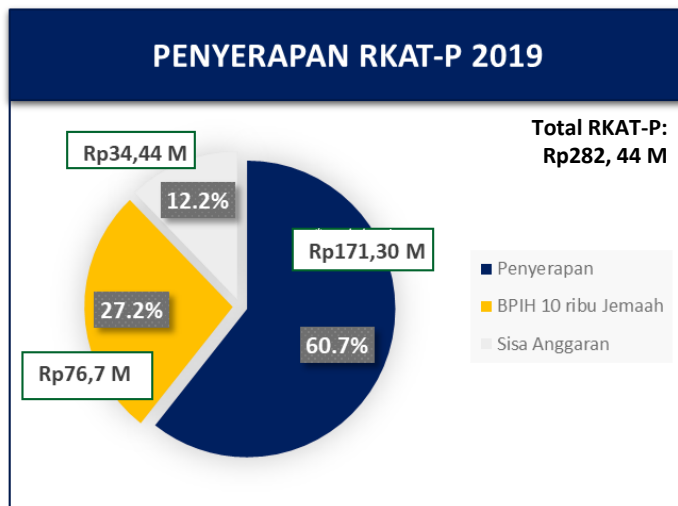
No	Bidang	Target 2019	Realisasi 2019	%
1	Pengembangan dan Kemaslahatan	66	81	123%
2	Keuangan	35	35	100%
3	Investasi	52	75	144%
4	Penempatan dan Teknologi Informasi	59	65,8	111.5%
5	Perencanaan dan Manajemen Risiko	43	54	126%
6	SDM dan Pengadaan	17	17	100%
7	Hukum dan Kepatuhan	42	56	133%
8	Audit Internal	13	16	123%
9	Sekban	47	47	100%
10	Sekdewas	103	101	98%
	Total Kegiatan	477	547,8	114,8%

Tabel 3.22. Penyerapan Anggaran per Bidang s.d. bulan Desember 2019

No	Bidang	RKAT-P 2019	RAKT-P Efisiensi 2019	Realisasi 2019	%
1	Pengembangan dan Kemaslahatan	7.320.315.000	5.549.517.000	3,469,235,914	62.5%
2	Keuangan	3.470.000.000	3.226.457.000	2,494,367,426	77.3%
3	Investasi	29.867.270.000	13.127.270.000	10,697,716,494	81.5%
4	Operasional	20.803.679.000	19.419.742.500	16,447,697,907	84.7%
5	Perencanaan dan Manajemen Risiko	5.667.022.840	5.167.022.840	4,351,109,200	84.2%
6	SDM dan Pengadaan	181.904.795.000	136.206.230.812	118,064,171,916	86.7%
7	Hukum dan Kepatuhan	10.595.773.404	4.315.773.404	1,999,034,413	46.3%
8	Audit Internal	1.555.745.760	925.022.500	816,738,918	88.3%
9	Sekretariat Badan Pelaksana	9.186.591.119	6.553.861.125	6,038,580,989	92.1%
10	Sekretariat Dewan Pengawas	12.068.651.819	11.206.070.154	6,924,284,516	61.8%
	Total	282.439.843.942	205.696.967.335*	171,302,937,693	83.3%

*)Realisasi anggaran mengacu pada pagu RKAT-P Efisiensi 2019

Sampai dengan bulan Desember 2019, penyerapan anggaran BPKH adalah sebesar Rp171,30 miliar (83,3%). Selain anggaran operasional, pada bulan Agustus juga telah dicatat berupa biaya penambahan kuota jemaah haji sebesar 10.000 orang yang diserap dari RKAT-P 2019 sebesar 27,2% atau setara dengan Rp76,7 miliar.



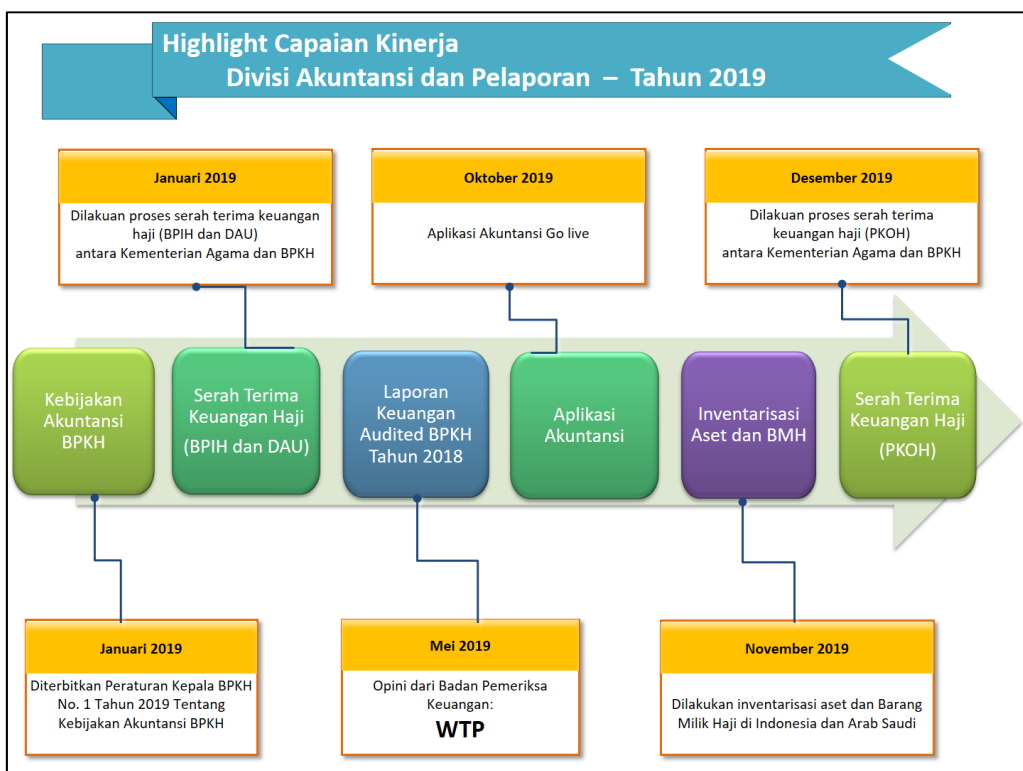
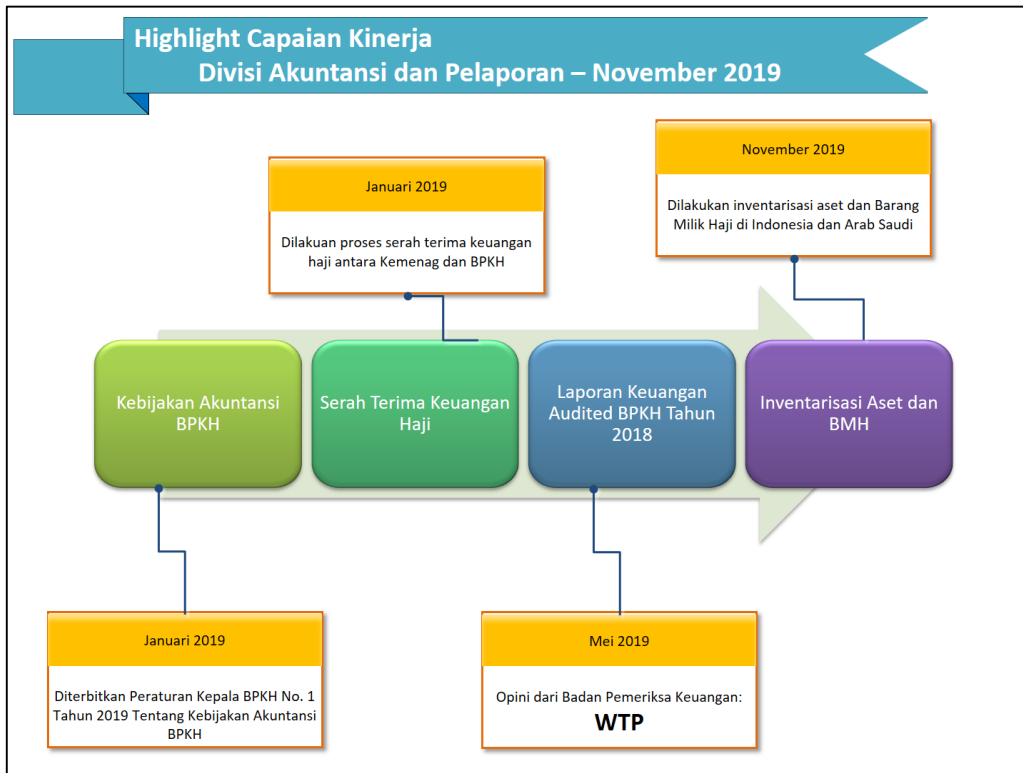
Gambar 8. Penyerapan Anggaran RKAT-P 2019

HIGHLIGHT PENCAPAIAN MASING-MASING BIDANG

A1 (PENGEMBANGAN DAN KEMASLAHATAN)



A2 (KEUANGAN)



A3 (INVESTASI)



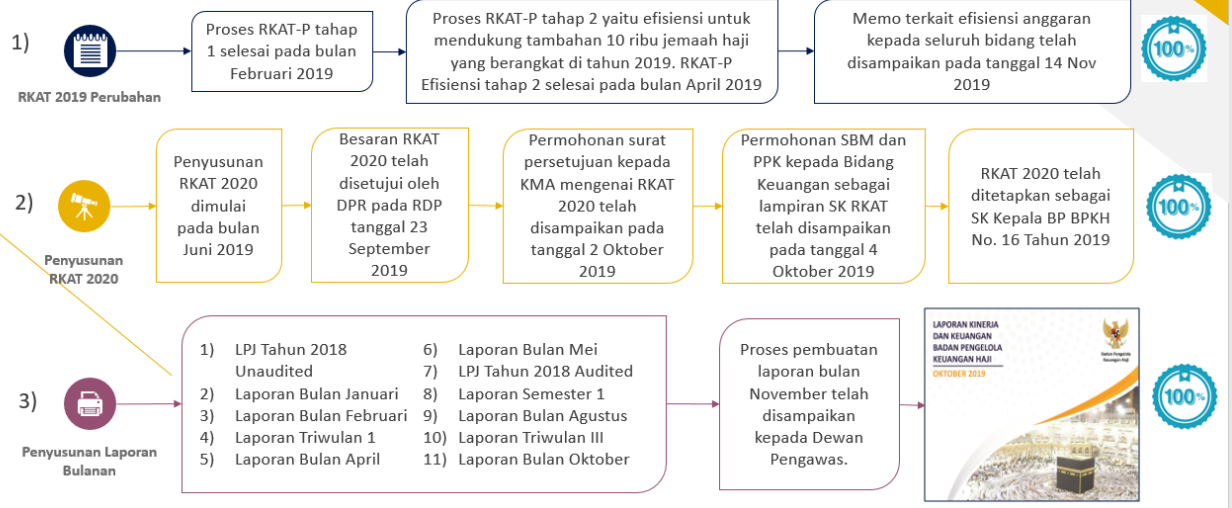
A4 (PENEMPATAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI)



A5 (PERENCANAAN DAN MANAJEMEN RISIKO)

Kinerja 2019- Divisi Perencanaan

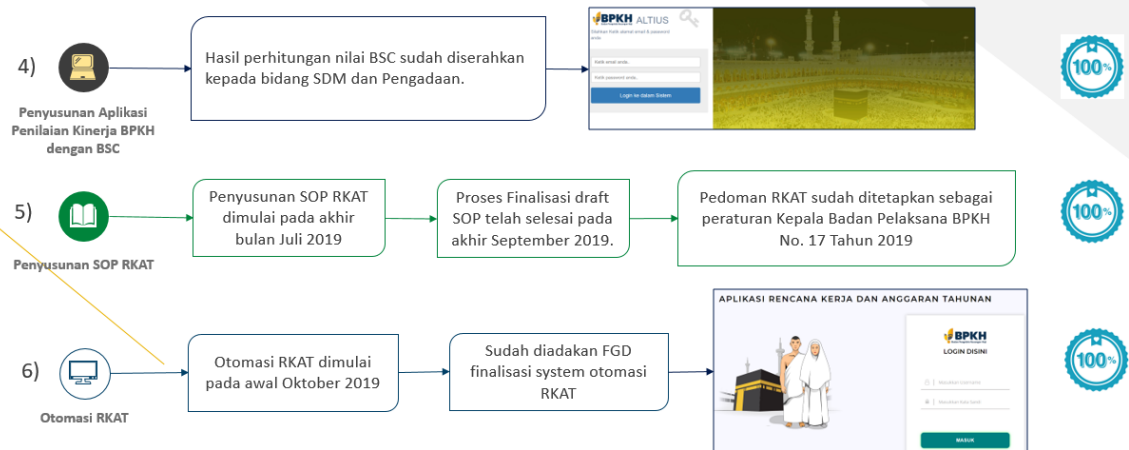
Pada tahun 2019, berikut kami sampaikan pencapaian masing-masing kegiatan dalam RKAT sebagai berikut:



Kinerja 2019 – Divisi Perencanaan

Progress 2019 Divisi Perencanaan

Pada tahun 2019, berikut kami sampaikan pencapaian masing-masing kegiatan dalam RKAT sebagai berikut:



Kinerja 2019- Divisi MR Korporasi



*Dashboard
Manajemen
Risiko*

100%



*Business
Continuity
Management*

100%



*Crisis
Management
Center*

100%



*ISO
9001:2015*

100%



*Pedoman &
Tata Kerja
Manajemen
Risiko*

100%



*Budaya
Sadat
Risiko*

100%



*Executive
Professional
training*

100%

Highlight Pencapaian MR Bisnis

1

Penyusunan Pedoman dan Prosedur Tata Kerja Bidang Manajemen Risiko: Pedoman Manajemen Risiko Bisnis.

100%

2

Kunjungan Kajian Risiko Investasi di Arab Saudi

100%

3

Kunjungan Kajian Risiko Investasi Dalam Negeri: Sudah dilakukan kunjungan Investasi Dalam Negeri yakni Ke Malang, Makassar dan Lombok.

100%

4



Telah disampaikan **100 kajian risiko**: 47 kajian investasi, 46 kajian penempatan, 3 kajian hukum dan kepatuhan, 2 kajian keuangan, 1 kajian kemaslahatan, dan 1 kajian audit internal.

Dari 100 kajian, 50 kajian direkomendasikan, 14 kajian direkomendasikan secara parsial, 23 tidak direkomendasikan, dan 13 lainnya.

KERJASAMA KELEMBAGAAN DAN PUBLIKASI MEDIA (SEKRETARIAT BADAN)

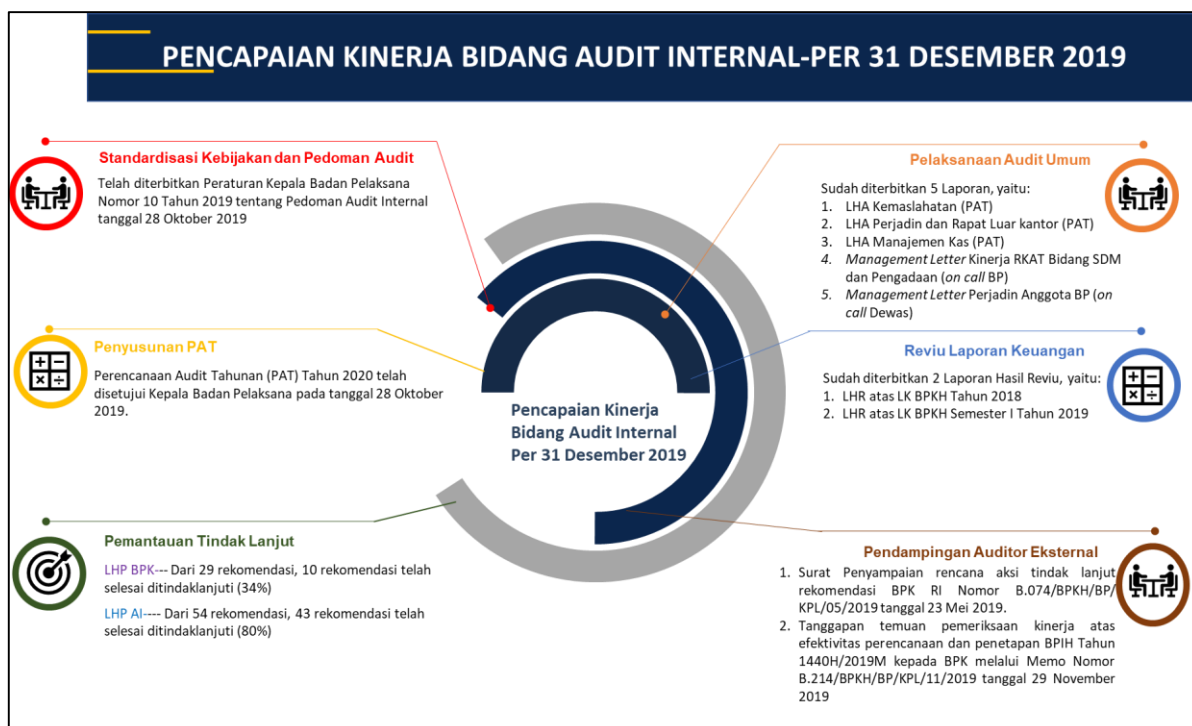
Selain kegiatan utama yang dilakukan BPKH, ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama Kelembagaan dan meningkatkan *Corporate Branding* yaitu berupa kegiatan *Media Expose* dan rapat dengan para *stakeholders*. Kegiatan-kegiatan terkait media dan interaksi dengan *stakeholders* sampai dengan bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23 Kegiatan terkait Media dan Interaksi dengan Stakeholders
bulan Desember 2019**

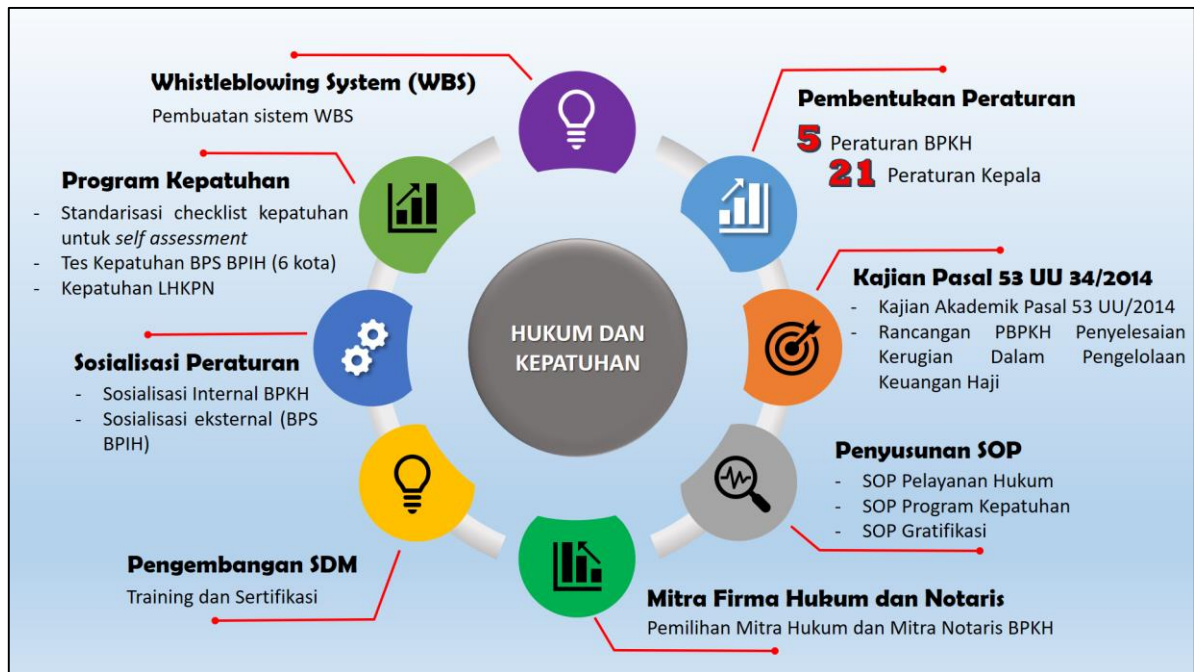
BULAN	NO	KEGIATAN
Desember	1	Raker BPKH
	2	Launching klinik rawat inap Solo peduli
	3	Annual Meeting BPKH_BPS BPIH
	4	Dokumentasi FGD Cut Loss
	5	PYD Bank NTB - BPKH
	6	BAST Serah terima Kemenag kepada BPKH

AUDIT INTERNAL

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, pencapaian kegiatan Bidang Audit Internal digambarkan sebagai berikut:

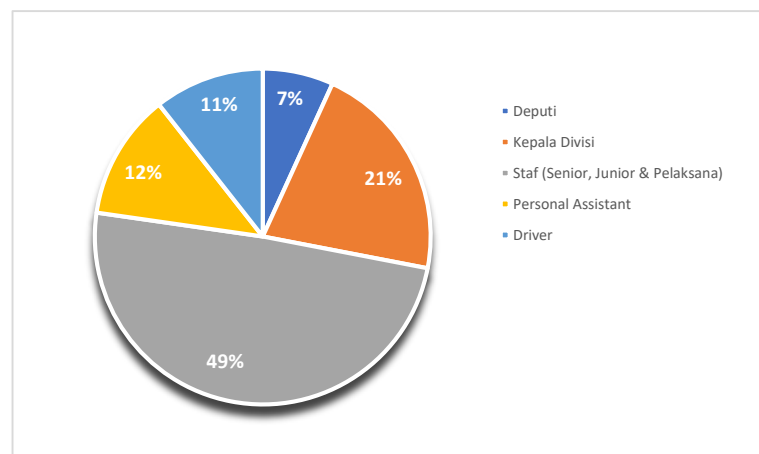


A7 (HUKUM DAN KEPATUHAN)



PENGELOLAAN SDM BPKH

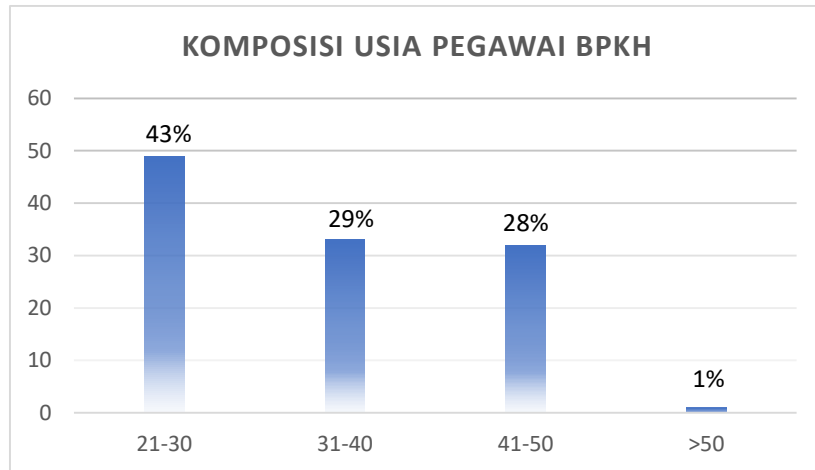
Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai Pegawai BPKH yang termasuk Pegawai Tetap dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja. Sampai dengan bulan Desember tahun 2019, jumlah pegawai BPKH saat ini adalah 132 orang. Jumlah tersebut tersebar ke dalam berbagai posisi antara lain Deputi, Kepala Divisi, Staf (Senior, Junior, dan Pelaksana), *Personal Assistant*, dan *Driver*. Sebaran data pegawai BPKH dapat dilihat pada Gambar 9 berikut ini:



Gambar 9. Sebaran Data Pegawai BPKH periode Desember 2019

Berdasarkan diagram di atas, sebaran data pegawai terlihat merata pada masing-masing jabatan. Komposisi terbesar dari jumlah pegawai BPKH adalah posisi Staf (Senior, Junior, dan Pelaksana).

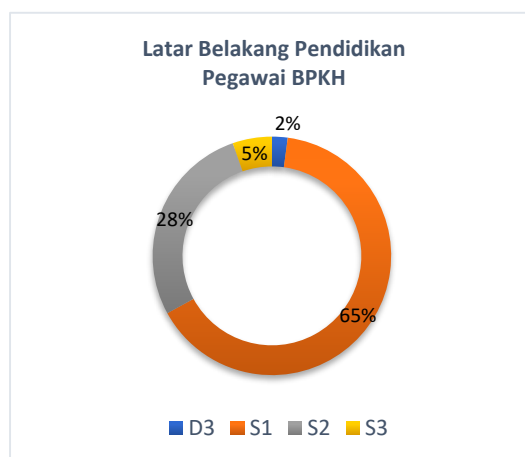
Mengenai komposisi usia dari masing-masing pegawai, dapat kami informasikan seperti pada gambar 9 di bawah ini:



Gambar 10. Komposisi Usia Pegawai BPKH

Gambar 10 diatas menunjukan bahwa sebanyak 43% pegawai BPKH berusia di antara 21-30 tahun, 29% pada usia 31-40 tahun, dan 29% berada pada rentang usia di atas 40 tahun. Pengelompokan usia pegawai tersebut selain anggota Badan Pelaksana, anggota Dewan Pengawas, dan *supporting staf* (*driver, office boy, security*).

Selain informasi mengenai rentang usia pegawai, kami mengklasifikasikan pegawai BPKH berdasarkan latar belakang pendidikannya. Sebanyak 65% berlatar belakang pendidikan S1, 28% berlatar belakang pendidikan S2, 5% berlatar belakang pendidikan D3, dan 2% berlatar belakang pendidikan S3. Informasi lebih rinci mengenai jumlah tersebut dapat kami sampaikan sesuai dengan gambar 10 di bawah ini:



Gambar 11. Latar Belakang Pendidikan Pegawai BPKH

Sampai dengan bulan Desember tahun 2019 *turn over* pegawai sebesar 6,72%, penyebab dari *turn over* tersebut antara lain sebanyak 9 orang pegawai mengundurkan diri.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai BPKH, Bidang SDM dan Pengadaan telah melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan. Adapun pelatihan yang dikelola dan telah dilaksanakan oleh Bidang SDM dan Pengadaan sampai dengan bulan Desember tahun 2019 antara lain:

Tabel 3.24 Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan di Bidang SDM

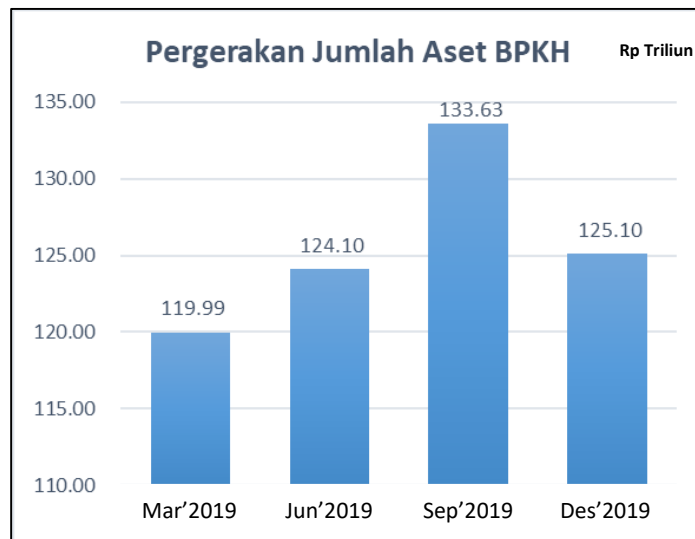
No	Nama Bidang	Jumlah Pegawai Bidang yang Mengikuti Pelatihan	Nama Pelatihan
1.	Seluruh Bidang	135 Orang	Induksi Pegawai BPKH
2.	Seluruh Bidang	31 Orang	Pelatihan Media Sosial
3.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	4 Orang	Pelatihan <i>Mastering Business Strategy & Portfolio and Program Management</i>
4.	Bidang SDM dan Kemaslahatan	10 Orang	Pelatihan <i>Service Excellence</i>
5.	Bidang SDM dan Pengadaan	1 Orang	Pelatihan <i>Purchasing Management</i>
6.	Bidang SDM dan Pengadaan	2 Orang	<i>Certified Human Resources Professional</i>
7.	Seluruh Bidang	39 Orang	<i>Islamic Finance & Manajemen Perhajian</i>
8.	Bidang SDM dan Pengadaan	2 Orang	<i>Certified International Profesional Purchasing</i>
9.	Seluruh Bidang	39 Orang	Pelatihan Protokol
10.	Seluruh Bidang	15 Orang	Pelatihan <i>Leadership 7 Habits</i>
11.	Seluruh Bidang	28 Orang	Pelatihan Coach the Coach

Kedepannya, kegiatan pelatihan akan terus diselenggarakan berdasarkan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai BPKH.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN BPKH BULAN DESEMBER TAHUN 2019

Kondisi kinerja keuangan BPKH sampai dengan bulan Desember tahun 2019 selalu menunjukkan pergerakan positif, namun total aset pada akhir tahun mengalami penurunan sebesar Rp8,53 triliun. Hal ini disebabkan oleh pemindahan akun pada neraca berupa “Uang Muka Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)” yang telah diakui sebagai beban dan dikategorikan sebagai bagian dari Laporan Realisasi Anggaran. Pergerakan jumlah aset tersebut tercermin pada gambar di bawah ini.



Gambar 12. Pergerakan Aset Keuangan BPKH

Berdasarkan Perpres nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji, pada pasal 11 ayat 2 diatur bahwa Kemampuan Keuangan Haji mencakup paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo keuangan haji. Berikut kami sajikan perhitungan 4 aspek tersebut yang tercermin pada tabel 4.1:

Tabel 4.1 Rasio Keuangan BPKH

No	Aspek	Ratio	%/Kali
1	Likuiditas	<i>Current Ratio</i>	29.812,18%
		Likuiditas Wajib	3,64 kali
2	Solvabilitas	<i>Debt Ratio</i>	96,08%
		<i>PDR (Porftolio Placement & Investment to Deposit Ratio)</i>	99,35%
3	Rentabilitas	<i>Return on Investment (RoI)</i>	6,17%
		<i>Return on Asset (RoA)</i>	6,13%
4	Efisiensi	<i>CIR (Cost to Income Ratio)</i>	2,34%

LAPORAN KEUANGAN BULAN DESEMBER 2019

Berikut disajikan data laporan keuangan BPKH bulan Desember tahun 2019 (data per tanggal 17 Januari 2020) yang terdiri dari: Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Aset Netto untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, serta Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019.

NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019 (Unaudited)	31 Desember 2018 (Audited)
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas		
Piutang	8.532.773.355,00	22.403.790.807,00
Pendapatan yang masih harus diterima	298.626.617.774,00	277.041.714.463,00
Penempatan pada bank	352.991.259.916,00	397.521.547.630,00
Investasi jangka pendek	54.298.093.367.380,00	65.431.515.209.285,00
Jumlah Aset Lancar	8.850.000.000.000,00	6.200.000.000.000,00
<i>Aset Tidak Lancar</i>	63.808.244.018.425,00	72.328.482.262.185,00
Investasi jangka panjang		
Aset tetap - bersih	61.135.795.356.848,00	40.720.915.396.724,00
Aset tak berwujud - bersih	143.770.839.605,00	1.035.550.279,00
Aset lain-lain	7.958.296.044,00	295.704.600,00
Jumlah Aset Tidak Lancar	948.313.899,00	47.362.429.633,00
TOTAL ASET	61.288.472.806.396,00	40.769.609.081.236,00
LIABILITAS	125.096.716.824.821,00	113.098.091.343.421,00
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Utang beban		
Utang jemaah tunda	3.281.562.554,00	20.353.133.239,00
Utang pajak	65.771.372.000,00	167.205.895.467,00
Utang lain-lain	352.315.029,00	32.187.021.230,00
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	144.628.882.119,00	127.477.904.727,00
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>	214.034.131.702,00	347.223.954.663,00
Dana titipan jemaah		
Pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan	119.737.416.825.757,00	106.890.037.122.723,00
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	238.078.541.630,00	1.471.966.774.776,00
JUMLAH LIABILITAS	119.975.495.367.387,00	108.362.003.897.499,00
ASET NETO	120.189.529.499.089,00	108.709.227.852.162,00
Tidak terikat		
Terikat temporer	883.007.071.224,00	198.669.561.205,00
Terikat permanen	1.935.438.867.753,00	2.101.452.543.299,00
JUMLAH ASET NETO	2.088.741.386.755,00	2.088.741.386.755,00
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	4.907.187.325.732,00	4.388.863.491.259,00
ASET	125.096.716.824.821,00	113.098.091.343.421,00

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

Uraian		2019 (Unaudited)	2018 (Audited)
Pendapatan setoran jemaah berangkat		7.626.469.193.173,00	7.226.282.920.797,00
Beban transfer BPIH ke Kementerian Agama		(14.628.017.168.797,00)	(13.771.380.238.444,00)
Surplus/(Defisit) BPIH		(7.001.547.975.624,00)	(6.545.097.317.647,00)
Pendapatan nilai manfaat Dana PIH		7.082.198.371.038,00	5.514.723.399.878,00
Penyaluran untuk rekening <i>virtual</i>		(1.083.000.000.000,00)	(777.394.808.723,00)
Beban operasional BPKH		(158.842.186.950,00)	(67.848.654.692,00)
Surplus/(Defisit) Dana PIH		5.840.356.184.088,00	4.669.479.936.463,00
Pendapatan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)		223.753.324.403,00	189.101.187.730,00
Penyaluran program kemaslahatan		(156.549.702.041,00)	(590.300.000,00)
Surplus/(Defisit) DAU		67.203.622.362,00	188.510.887.730,00
Akumulasi Surplus/(Defisit)		(1.093.988.169.174,00)	(1.687.106.493.454,00)
Penggunaan nilai manfaat akumulasi tahun sebelumnya		1.233.888.233.146,00	2.000.000.000.000,00
Total Surplus/(Defisit)		139.900.063.972,00	312.893.506.546,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif lain		378.877.517.727,00	46.810.706.729,00
Total Surplus Komprehensif		518.777.581.699,00	359.704.213.275,00

**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	2019 (Audited)
ASET NETO TIDAK TERIKAT	
Saldo awal	47.362.429.633,00
Surplus/(Defisit) tahun berjalan	305.459.992.293,00
Saldo Akhir	352.822.421.926,00
Penghasilan Komprehensif Lain	
Saldo awal	151.307.131.571,00
Penghasilan/(Beban) komprehensif tahun berjalan	378.877.517.727,00
Koreksi aset neto tidak terikat	-
Saldo Akhir	530.184.649.298,00
Total Aset Neto Tidak Terikat	883.007.071.224,00
ASET NETO TERIKAT TEMPORER	
Saldo awal	2.101.452.543.300,00
Surplus tahun berjalan	139.900.063.972,00
Koreksi aset neto:	
Penggunaan efisiensi haji tahun 2017 dan 2018	(305.913.739.519,00)
Saldo Akhir	1.935.438.867.753,00
ASET NETO TERIKAT PERMANEN	
Saldo awal	2.088.741.386.755,00
Surplus tahun berjalan	-
Saldo Akhir	2.088.741.386.755,00
TOTAL ASET NETO	4.907.187.325.732,00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

Uraian	2019 (Unaudited)	2018 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan nilai manfaat	8.994.756.570.935,00	6.709.881.548.106,00
Penerimaan operasional efisiensi haji 1439 H/2018 M	166.014.280.841,00	306.944.214.134,00
Penerimaan dana jemaah tidak berangkat 1439 H/2018 M	44.189.072.875,00	0,00
Penerimaan lain-lain	155.476.941.257,13	46.117.660.659,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari nilai manfaat	(7.307.461.715.143,00)	(4.805.472.741.362,00)
Pengeluaran beban pajak nilai manfaat	(1.454.642.028.447,00)	(1.226.397.256.711,00)
Pengeluaran operasional BPKH	(168.021.375.139,00)	(59.543.160.051,00)
Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam	(156.549.702.041,00)	(590.300.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Operasi	273.762.045.138,13	970.939.964.775,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian aset tetap	(9.899.870.254,00)	(1.374.379.006,00)
Pembelian aset tak berwujud	(5.151.130.161,00)	(394.272.800,00)
Penempatan (net)	11.133.421.841.905,00	2.872.593.094,00
Investasi (net)	(23.064.879.960.124,00)	(9.849.606.693.723,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Investasi	(11.946.509.118.634,00)	(9.848.502.752.435,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan setoran jemaah	22.388.830.390.386,00	20.915.827.909.503,00
Pengeluaran transfer penyelenggaraan ibadah haji dari setoran jemaah	(7.626.469.193.173,00)	(7.226.282.920.797,00)
Pengeluaran untuk pengembalian dan pembatalan BPIH	(1.869.596.908.023,12)	(2.789.578.410.239,00)
Pengeluaran nilai manfaat yang ditangguhkan	(1.233.888.233.146,00)	(2.000.000.000.000,00)
Kas Bersih yang diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	11.658.876.056.043,90	8.899.966.578.467,00
Kenaikan (penurunan) Kas dan Setara Kas	(13.871.017.452,00)	22.403.790.807,00
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	22.403.790.807,00	0,00
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	8.532.773.355,00	22.403.790.807,00

BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Haji bulan Desember Tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pelaksana BPKH dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, bertujuan untuk mendorong pencapaian target BPKH di tahun 2019. Oleh karena itu, Badan Pelaksana akan memastikan bahwa seluruh proses kegiatan dilaksanakan sesuai dengan *input* dan *output* yang telah direncanakan, serta anggaran digunakan berdasar pada prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.